



**DAMPAK PEMBATALAN HASIL PEMILU 2 FEBRUARI 2014 OLEH
MAHKAMAH KONSTITUSI THAILAND TERHADAP PENYELESAIAN
KRISIS POLITIK THAILAND**

***“IMPACTS OF CANCELLATION OF FEBRUARI 2, 2014 ELECTION BY
THAILAND CONSTITUTIONAL COURT ON THAILAND POLITICAL CRISIS
RESOLUTION”***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh
Nadia Sarah Amalia
NIM. 100910101029

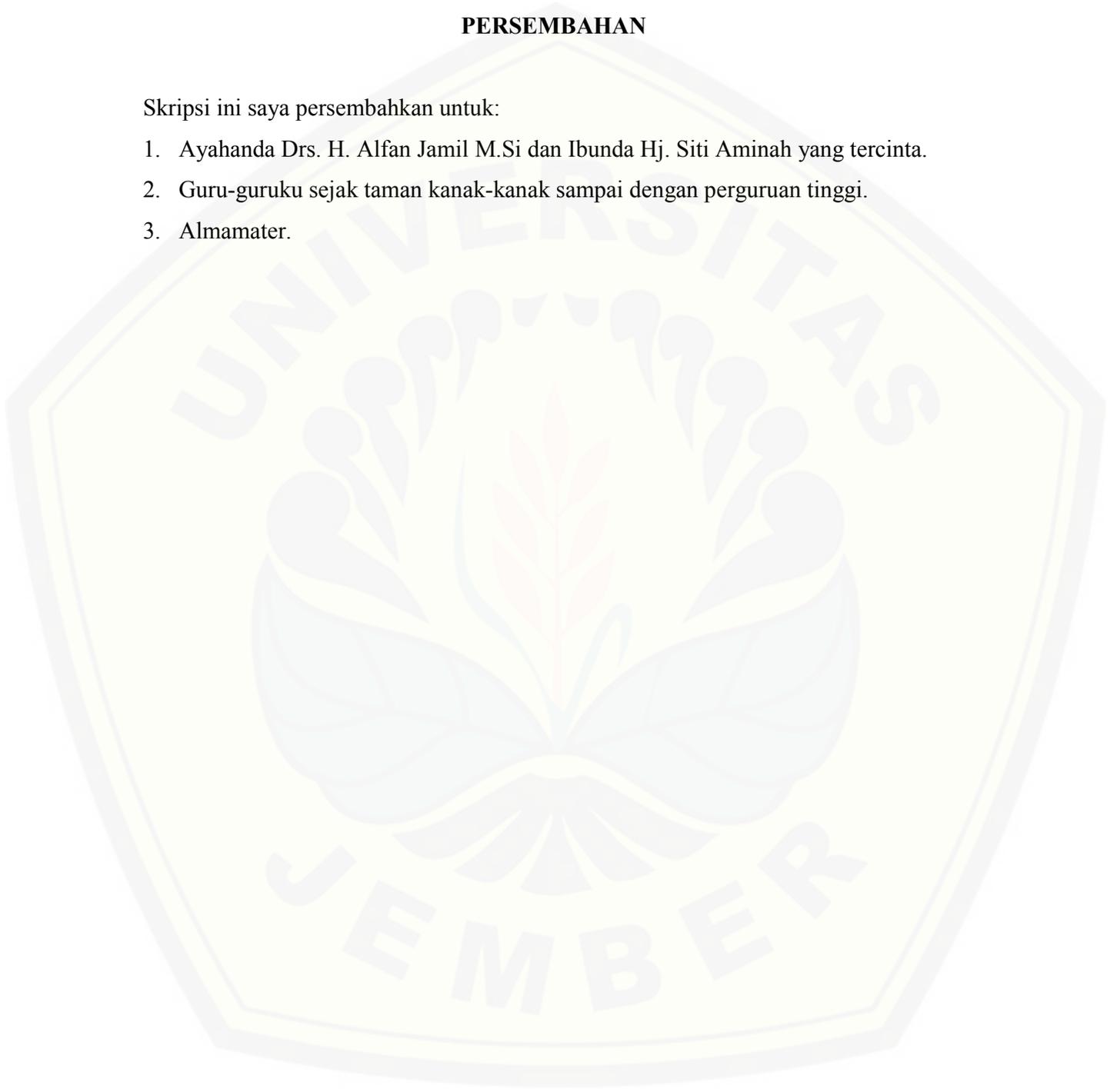
**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2015

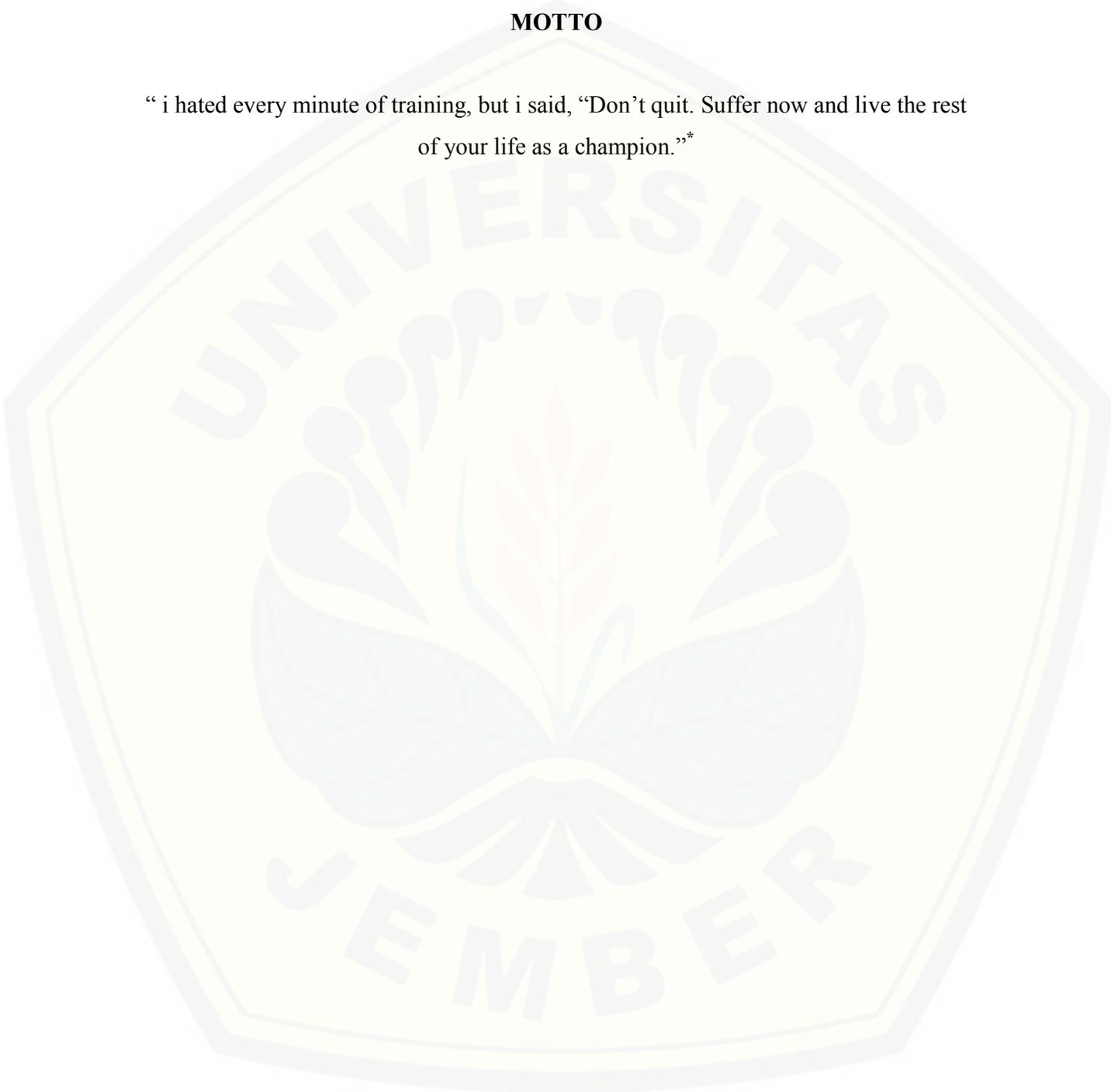
PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Drs. H. Alfian Jamil M.Si dan Ibunda Hj. Siti Aminah yang tercinta.
2. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.
3. Almamater.



MOTTO

“ i hated every minute of training, but i said, “Don’t quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion.”*


* Muhammad Ali dalam <http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/m/muhammadal148629.html> pada 18 Maret 2015

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Sarah Amalia

NIM : 100910101029

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Dampak Pembatalan Hasil Pemilu 2 Februari 2014 Oleh Mahkamah Konstitusi Thailand Terhadap Penyelesaian Krisis Politik Thailand” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Maret 2015
Yang menyatakan,

Nadia Sarah Amalia
NIM 100910101029

SKRIPSI

**DAMPAK PEMBATALAN HASIL PEMILU 2 FEBRUARI 2014 OLEH
MAHKAMAH KONSTITUSI THAILAND TERHADAP PENYELESAIAN
KRISIS POLITIK THAILAND**

Oleh:

**Nadia Sarah Amalia
100910101029**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Abubakar Eby Hara, MA., Ph.D

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Djoko Susilo, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Dampak Pembatalan Hasil Pemilu 2 Februari 2014 Oleh Mahkamah Konstitusi Thailand Terhadap Penyelesaian Krisis Politik Thailand” telah diuji dan disahkan pada:

Hari : Jum’at
Tanggal : 20 Februari 2015
Waktu : 08.30
Tempat : Ruang LKPK

Tim Penguji:

Ketua

Drs. Supriyadi, M.Si.
NIP 195803171985031003

Sekretaris I

Sekretaris II

Drs. Abubakar Eby Hara, MA. Ph.D
NIP 196402081989021001

Drs. Djoko Soesilo, M.Si
NIP 195908311989021001

Anggota I

Anggota II

Drs. Pra Adi Sulistiyono, M.Si
NIP 196105151988021001

Dra. Sri Yuniati, M.Si
NIP

Mengesahkan
Dekan,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
NIP 195207271981031003

RINGKASAN

Dampak Dibatalkannya Pemilu 2 Februari 2014 Oleh Mahkamah Konstitusi Thailand Terhadap Penyelesaian Krisis Politik Di Thailand; Nadia Sarah Amalia, 100910101029; 2015:84 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Pada masa PM Yingluck Sinawatra, Thailand mengalami krisis politik. Krisis politik itu berawal dari adanya penolakan oleh oposisi terhadap rancangan undang-undang (RUU) amnesti. Dirumuskannya RUU Amnesti tidak menyelesaikan masalah justru menimbulkan masalah baru. Masalah ini muncul dari pihak oposisi yang berkeinginan untuk menggulingkan PM Yingluck. Pihak oposisi telah hilang kepercayaan kepada Yingluck karena adanya kebijakan RUU tersebut dipandang untuk melindungi PM sebelumnya yaitu Thaksin S. Untuk menyelesaikan krisis politik PM Yingluck memberikan solusi untuk mengadakan pemilu 2 Februari 2014. Ketika hasil menunjukkan PM Yingluck kembali menang, maka kubu oposisi membawa gugatan ke MK untuk menolak hasil pemilu dengan alasan tidak sah karena tidak dilakukan secara serempak, maka pada tanggal 21 Maret MK memutuskan untuk membatalkan hasil pemilu 2 Februari tersebut dengan alasan inkonstitusional. Dengan dibatalkannya hasil pemilu 2 Februari 2014 gelombang demonstrasi di Thailand semakin besar. Oposisi menuntut PM Yingluck untuk segera turun dari jabatannya karena ditemukan adanya banyak tindakan korupsi dan tindakan nepotisme untuk menyelamatkan kakaknya dari jeratan hukum yang juga terlibat dalam kasus korupsi sebelumnya.

Penulis menggunakan metode deskriptif dalam menganalisa data. Deskriptif adalah upaya untuk menjawab pertanyaan siapa, apa, di mana, kapan, atau berapa, jadi merupakan upaya melaporkan apa yang terjadi. Dengan menggunakan metode pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, media cetak serta internet. Penulis juga merumuskan argumen utama tentang latar belakang apa dampak yang terjadi dari pembatalan hasil pemilu 2 Februari 2014 tersebut.

Dampak yang ditimbulkan dari pembatalan hasil pemilu 2 Februari 2014 oleh Mahkamah Konstitusi Thailand adalah krisis politik yang berkeanjutan sehingga militer mengintervensi ke dalam krisis politik tersebut hingga kudeta militer kembali menduduki Thailand dan Pemakzulan terhadap PM Yingluck Sinawatra menjadi akhir dari pemerintahannya.

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dampak Pembatalan Hasil Pemilu 2 Februari 2014 Oleh Mahkamah Konstitusi Thailand Terhadap Penyelesaian Krisis Politik Thailand”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Abubakar Eby Hara, MA., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Utama dan Drs. Djoko Susilo, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatian, dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
2. Adhiningasih P. S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas dorongan dan bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa;
3. Bapak dan ibu dosen di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa;
4. Sahabat dan teman-teman di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember angkatan 2010 yang telah menjadi teman untuk berbagi dan diskusi dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 17 Februari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUANG LINGKUP PEMBAHASAN	5
1.2.1 BATASAN MATERI	6
1.2.2 BATASAN WAKTU	6
1.3 RUMUSAN MASALAH.....	6
1.4 TUJUAN PENELITIAN.....	7
1.5 KERANGKA KONSEPTUAL	8
1.5.1. KONSEP KOSOLIDASI DEMOKRASI	8
1.5.2. KONSEP MILITER DALAM POLITIK.....	12
1.6 ARGUMEN UTAMA.....	20
1.7.1 TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	21
1.7.2 METODE ANALISIS DATA.....	21
1.8 SISTEMATIKA PENULISAN.....	22
BAB II. GAMBARAN KRISIS POLITIK DI THAILAND.....	24
2.1 KRONOLOGI KONFLIK POLITIK DI THAILAND PADA MASA PM YINGLUCK SINAWATRA.....	24
2.2 KONFLIK POLITIK THAILAND: KELUARGA THAKSIN VS PARTAI DEMOKRAT	26
2.3 KONFLIK ANTARA KAOS MERAH DAN KUNING.....	30
2.4 KETERLANJUTAN KRISIS POLITIK DI THAILAND.....	32

BAB III. PELAKSANAAN PEMILU 2 FEBRUARI 2014 DI THAILAND.....	36
3.1 SISTEM PEMILU THAILAND.....	36
3.2 PEMILU SEBAGAI SOLUSI PENYELESAIAN KRISIS.....	36
3.3 PEMBOIKOTAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMILU DINI 2 FEBRUARI 2014.....	42
3.4 PEMBATALAN HASIL PEMILU DINI 2 FEBRUARI 2014.....	45
BAB IV. DAMPAK PEMBATALAN HASIL PEMILU 2 FEBRUARI 2014 48 TERHADAP PENYELESAIAN KRISIS POLITIK THAILAND.....	48
4.1 DAMPAK KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBATALKAN HASIL PEMILU FEBRUARI 2014 THAILAND	48
4.2 KUDETA MILITER THAILAND 2014	54
4.3 INTERVENSI MILITER DALAM POLITIK THAILAND.....	62
4.4 PEMAKZULAN TERHADAP YINGLUCK SINAWATRA.....	73
BAB V. KESIMPULAN	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Thailand kembali memasuki krisis baru setelah Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand pada tanggal 21 Maret 2014 menyatakan pemilihan umum parlemen pada 2 Februari 2014 lalu tidak sah,² sehingga pemilu baru harus segera digelar.³ Alasan MK untuk membatalkan hasil Pemilu Majelis Rendah Parlemen Thailand tersebut adalah karena pemilu yang dimenangkan partai pemerintah itu tidak sah karena tidak dilakukan secara serempak. Padahal, dalam UUD Thailand disebutkan, pemilu harus dilaksanakan secara bersamaan. Akibat dari adanya pengumuman MK ini telah menyebabkan kebuntuan politik yang kian panjang di Negeri Thailand. Akibat pembatalan hasil pemilu dan rencana pemakzulan Yingluck Shinawatra, krisis politik di negeri Thailand itu semakin mendalam.⁴ Rakyat negara Thailand pun semakin terpolarisasi, yakni antara kelas menengah-atas (massa Kaus Kuning) yang mendukung oposisi dengan warga miskin yang menjadi pendukung setia kelompok Yingluck Shinawatra.

Beberapa hari setelah Putusan MK itu keluar atau tepatnya pada tanggal 31 Maret 2014, Thailand kemudian juga melaksanakan pemilihan anggota majelis tinggi parlemen untuk memilih separuh dari 150 kursi anggota Senat Thailand. Pemilu senat itu digelar hanya sehari setelah puluhan ribu demonstran antipemerintah turun ke jalan menuntut pengunduran diri Yingluck Shinawatra. Para musuh Yingluck Shinawatra tersebut ingin agar pemimpin negara itu menghadapi pemakzulan (*impeachment*) atas pembagian beras yang kacau secara finansial itu. Senat yang di dominasi politikus antipemerintah itu bisa mempercepat pelengserannya. Pemakzulan

² The Wall Street Journal. 21 Maret 2014. Mahkamah Thailand Batalkan Hasil Pemilu. Diakses dari: <http://indo.wsj.com/posts/2014/03/21/mahkamah-thailand-batalkan-hasil-pemilu/> (15 April 2014)

³ Menurut Sekjen MK Pimol Thampitakpong dalam jumpa pers di Bangkok, Jumat (21/3/2014). Keputusan MK untuk membatalkan pemilu tersebut, dilakukan lewat pemungutan suara. Hasilnya, enam hakim agung menilai pemilu bulan lalu itu tak sah. Hanya tiga hakim yang menolak putusan itu.

⁴ Koran Sindo. 03 April 2014. Konflik Politik Thailand - Mahkamah Konstitusi Anulir Pemilu. Diakses dari: <http://m.koran-sindo.com/node/376818> (15 April 2014)

Yingluck membutuhkan suara tiga perlima dari senator. Dengan krisis politik Thailand memasuki bulan keenam, pemilu Senat ini dinilai cukup penting.⁵

Sejumlah pakar menyebut para anggota yang terpilih dalam pemilu itu bisa berisi banyak anggota pro-pemerintahan untuk membantu memperkuat pemerintah dalam menghadapi tantangan hukum yang kian membesar. Sementara senator yang tidak terpilih bisa ditunjuk menjadi anggota institusi yang dipandang bersekutu dengan kubu anti-pemerintah, seperti Mahkamah Konstitusional (MK) dan Komisi Pemilu (KPU).

Pembatalan hasil pemilu pada 2 Februari 2014 itu menyebabkan Thailand memasuki krisis politik baru dan Yingluck tetap memainkan peran sebagai penguasa sementara dengan kekuasaan terbatas atas pemerintahan hingga pemilu dengan jumlah pemilih yang mencukupi akan membentuk komposisi parlemen yang kuorum. KPU menyatakan akan butuh setidaknya tiga bulan untuk menggelar pemilu baru, tapi pemilu itu pun tampaknya tidak akan berjalan lancar. Di satu sisi, para pendukung pemerintah menuduh pengadilan dan menyebut banyak hakim yang bersekutu dengan kubu konservatif. Namun di sisi lain para demonstran telah bertekad mengganggu pemilu apa pun yang digelar sebelum perubahan politik terjadi. Pemilu Senat tampaknya akan memberikan hasil yang sama dengan pemilu 2 Februari 2014 yang dibatalkan itu, artinya pro-pemerintah akan menang.⁶

Namun ada pendapat berbeda dari analisis politik Kan Yuenyong di Siam Intelligence Unit seperti yang dikutip Reuters bahwa sebagian besar atau sekitar 90%, senator yang ditunjuk berasal dari kubu anti-pemerintah.⁷ Jadi kalau Senat diminta melengserkan Yingluck, jumlah anggota senat tersebut sangat dekat dengan jumlah suara yang dibutuhkan untuk melakukan itu.

⁵Koran Sindo. Senin 31 Maret 2014. Thailand Gelar Pemilu Senat - Nasib Yingluck Ditentukan Hari Ini. Diakses dari: <http://koran-sindo.com/node/378816> (15 April 2014)

⁶Jawa Pos. Sabtu, 22 Maret 2014. Pemilu Thailand Tidak Sah.

⁷Sindonews.com. Kamis, 5 Juni 2014. Junta Militer Thailand Singkirkan Kroni-kroni Shinawatra. Diakses dari: <http://international.sindonews.com/read/870298/40/junta-militer-thailand-singkirkan-kroni-kroni-shinawatra> (18 Juni 2014)

Thailand telah terjebak dalam kebuntuan politik sejak Thaksin digulingkan dalam sebuah kudeta militer pada 2006. Konflik itu terpusat pada kelas menengah yang berbasis di Bangkok dan kubu kerajaan melawan pendukung keluarga Shinawatra yang sebagian miskin dan tinggal di pedesaan.

Krisis politik itu kini memasuki tahap baru yang krusial setelah Komisi Anti Korupsi Nasional (*National Anti Corruption-Commission, NACC*) memanggil Yingluck Shinawatra terkait skema subsidi beras. Badan antikorupsi itu menuduh Yingluck Shinawatra mengabaikan peringatan korupsi dan kerugian finansial dalam kebijakan tersebut.⁸ Jika dinyatakan bersalah, Yingluck Shinawatra akan menghadapi pemungutan suara pemakzulan di majelis tinggi yang bisa menyebabkan dirinya dilengserkan sebagai perdana menteri dan dilarang memasuki kancah politik selama lima tahun.⁹

NACC sebenarnya meminta Yingluck Shinawatra untuk hadir ke kantor lembaga ini pada 27 Maret 2014 guna mendengarkan dakwaan yang dialamatkan kepada dirinya terkait tuduhan kelalaian dalam menjalankan tugas. Dakwaan ini jika terbukti kebenarannya di pengadilan akan berujung pada pengunduran diri perdana menteri. Surat panggilan ini dinilai oleh Yingluck Shinawatra sangat tergesa-gesa dan ia mengingatkan bahwa NACC tidak memberi waktu yang cukup kepada tim pengacaranya untuk memberi pembelaan. Sebelumnya tim pengacara Yingluck Shinawatra meminta NACC memberi tenggat waktu 45 hari untuk menyusun pembelaan terhadap perdana menteri. Namun lembaga anti-korupsi Thailand (NAAC) menolak permintaan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dan tim pengacaranya untuk memperpanjang tenggat waktu bagi pembelaan dirinya menyangkut tuduhan kelalaian dalam menjalankan tugas.¹⁰

Eskalasi represi terhadap perdana menteri untuk mengundurkan diri malah kemudian memperkuat gerakan kubu pro pemerintah pasca pembatalan hasil pemilu

⁸Suara Pembaruan. Jumat, 21 Februari 2014. Yingluck Bantah Tuduhan Korupsi. Diakses dari: <http://www.suarapembaruan.com/home/yingluck-bantah-tuduhan-korupsi/49976> (15 April 2014)

⁹Jawa Pos. Jum'at 9 Mei 2014. "Nasib Yingluck Kian Terpuruk".

¹⁰Kompas. Minggu, 16 Maret 2014. Krisis Thailand "Gelombang Demonstrasi Belum Juga Berakhir".

Februari lalu oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Konsentrasi pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 kubu ini di depan gedung Komisi Anti-Korupsi Nasional (NACC) dapat dicermati sebagai upaya mereka mendukung pemerintah.¹¹

Sementara itu, para pendukung Yingluck Shinawatra menilai langkah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Anti-Korupsi Nasional (NACC) terhadap perdana menteri sebagai tindakan pengalihan masalah guna mengeluarkan partai berkuasa pimpinan Yingluck Shinawatra dari kekuasaan. Mereka juga meyakini bahwa pengaruh kubu anti pemerintah di dua lembaga pemerintah ini telah mendorong MK dan NACC lebih condong kepada kubu anti pemerintah. Bahkan kubu pro pemerintah mengancam akan melakukan tindakan lebih dan mengirim surat kepada Sekjen PBB, Ban Ki Moon, terkait hancurnya demokrasi di negara Thailand oleh kubu anti demokrasi. Anuttama Amornvivat, wakil sekjen partai berkuasa di Thailand dalam suratnya menyebutkan, instabilitas politik terbaru di negara ini telah mengakibatkan kubu anti demokrasi dengan ulahnya mengobarkan bentrokan dan kerusuhan jalanan telah merusak proses demokrasi di Thailand.¹²

Menurut Paul Chambers, direktur riset di Institute of South East Asian Affairs di Chiang Mai University, Senat Thailand sebenarnya bisa mempermudah berakhirnya pemerintahan Yingluck Shinawatra dalam dua pekan setelah NACC mengeluarkan keputusan. Dalam kurun waktu itu, Senat bisa memutuskan apakah akan memakzulkan Yingluck Shinawatra atau tidak. Upaya partai Yingluck Shinawatra untuk mendorong rancangan undang-undang (RUU) yang akan membuat Senat dipilih sepenuhnya diblokir Mahkamah Konstitusional pada November lalu karena lembaga itu menganggap RUU itu inkonstitusional.¹³

Mahkamah Konstitusi Thailand pada Rabu 7 mei 2014 memutuskan untuk memberhentikan Yingluck dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Yingluck

¹¹Iran Indonesian Radio. Sabtu 29 Maret 2014. Gejolak Politik dan Ancaman Disintegrasi di Thailand. Diakses dari: http://indonesian.ws.irib.ir/editorial/fokus/item/78557-Gejolak_Politik_dan_Ancaman_Disintegrasi_di_Thailand. (17 April 2014)

¹²ibid

¹³Koran Sindo. Senin 31 Maret 2014. Thailand Gelar Pemilu Senat - Nasib Yingluck Ditentukan Hari Ini. <http://koran-sindo.com/node/378816> (17 April 2014)

digantikan oleh Menteri Pergiagaan Niwatthamrong Boonsongphaisan sebagai perdana menteri sementara, seorang sekutu yang dekat dengan PM Yingluck dan kakaknya yang berpengaruh yaitu bekas Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Walaupun Mahkamah mengeluarkan keputusan tersebut, banyak demonstran tidak puas, karena banyak anggota pemerintahan Yingluck masih tetap memegang jabatan mereka. Komisi Anti-Korupsi Thailand pada hari berikutnya menambah beban Yingluck saat memutuskan bahwa ada cukup bukti untuk mendakwa dalam program subsidi beras yang kontroversial tersebut, yang menurut para pengkritiknya, penuh dengan korupsi dan penghamburan uang milyaran dolar. Kasus tersebut akan diajukan ke Senat, dimana Yingluck akan menghadapi pemungutan suara impeachment yang dapat menjatuhkan hukuman larangan 5 tahun berpolitik.¹⁴

Atas dasar latar belakang permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai kelanjutan krisis politik Thailand pasca Keputusan Pembatalan Hasil Pemilu 2 Februari 2014 lalu oleh MK Thailand tersebut dalam judul: **“Dampak Pembatalan Hasil Pemilu 2 Februari 2014 Oleh Mahkamah Konstitusi Thailand Terhadap Penyelesaian Krisis Politik di Thailand”**.

1.2 RUANG LINGKUP PEMBAHASAN

Dalam melakukan analisa pada studi hubungan Internasional, pembatasan ruang lingkup menjadi amat penting. Hal ini bertujuan untuk membatasi masalah agar pembahasan tidak berkembang luas ataupun keluar dari pokok permasalahan. Ruang lingkup pembahasan terbagi dua yakni batasan materi dan batasan waktu.

¹⁴VOA Indonesia. 9 Mei 2014. Ribuan Demonstran Anti-Pemerintah Turun ke Jalanan Bangkok. Diakses dari: <http://www.voaindonesia.com/content/ribuan-demonstran-anti-pemerintah-turun-ke-jalanan-bangkok/1911056.html> (10 Mei 2014)

1.2.1 BATASAN MATERI

Batasan materi mencakup ruang lingkup wilayah dan gejala-gejala yang muncul dari permasalahan. Dalam karya tulis ini penulis membahas tentang krisis politik Thailand pasca penolakan hasil pemilu 2 Februari 2014 oleh Mahkamah Konstitusi Thailand dan pemecatan PM Yingluck Sinawatra yang mengakibatkan krisis terus berlanjut.

1.2.2 BATASAN WAKTU

Penulis mengkaji krisis politik di Thailand ini dengan memberikan batasan waktu, yakni dimulai sejak PM Yingluck menjadi sasaran demonstrasi sejak November 2013 lalu dimana dia berupaya mengeluarkan amnesti yang bisa membebaskan saudaranya yaitu mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra dari statusnya sebagai napi. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Thaksin kabur ke luar negeri, setelah pengadilan di Bangkok pada 2008 menghukumnya dua tahun penjara atas kasus korupsi. Batasan waktu penelitian dibatasi sampai Perdana Menteri Yingluck dipecat oleh MK dan Senat memberikan keputusan untuk memakzulkan Yingluck dan digantikan oleh Perdana Menteri sementara yaitu wakilnya Niwatthamrong Boonsongpaisan sekitar bulan Mei 2014.

1.3 RUMUSAN MASALAH

Sebuah karya ilmiah dituntut untuk dapat memaparkan hal yang menjadi pokok permasalahan. Permasalahan merupakan hal yang mendasar yang harus dibuat dalam setiap penelitian ilmiah. Perumusan masalah akan dapat membantu dalam memberikan pencarian fokus pembahasan.

Menurut Suharsini Arikunto :

“Agar penelitian dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka penelian harus merumuskan masalahnya sehingga jelas dari mana harus memulai, kemana harus pergi dan dengan apa”.¹⁵

Sedangkan menurut **Winarno Surakhmad**, permasalahan dapat didefinisikan sebagai berikut :

“Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dapat dianalisa sebagai suatu tantangan yang mesti dilalui atau dengan jalan mengatasinya apabila ingin berjalan terus.”¹⁶

Dan pengertian tersebut dapat dilihat hubungan masalah dengan ilmu. Suatu penelitian ilmiah berangkat dari permasalahan yang muncul dalam benak kita dalam bentuk serangkaian pertanyaan yang memerlukan jawaban.

Rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ilmiah ini adalah :

“Apa dampak keputusan Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil pemilu 2 Februari 2014 terhadap penyelesaian krisis politik di Thailand?”

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dampak dibatalkannya Pemilu 2 Februari 2014 terhadap penyelesaian krisis politik di Thailand
2. Untuk memberi gambaran tentang bagaimana proses konsolidasi demokrasi di Thailand pada masa Pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dan keterlibatan militer dalam politik Thailand.

¹⁵ Suharmini Arikunto. 1989. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:PT. Bina Aksara, hal. 7

¹⁶ Winarno Surakhmad. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Transisi. Hal 8

1.5 KERANGKA KONSEPTUAL

Menurut Mochtar Mas'ood konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu objek, sifat suatu objek atau fenomena tertentu.¹⁷ Sehingga dapat menyederhanakan apa yang menjadi permasalahan.

1.5.1. KONSEP KONSOLIDASI DEMOKRASI

Tulisan ini mencoba untuk menelaah secara mendalam mengenai krisis politik Thailand Pasca Penolakan hasil Pemilu Februari 2014 oleh Mahkamah Konstitusi Thailand dengan menggunakan konsep Konsolidasi Demokrasi.

Konsolidasi demokrasi dapat diartikan sebagai proses penggabungan beberapa elemen demokrasi untuk bersama-sama secara padu memfasilitasi demokratisasi politik.¹⁸ Unsur yang terlibat dalam konsolidasi demokrasi adalah lembaga atau institusi politik, baik partai politik, elite, kelompok-kelompok kepentingan mau pun masyarakat politik.¹⁹ Unsur penting lainnya dalam konsolidasi demokrasi adalah adanya kesepakatan bersama menyangkut “nilai-nilai politik” yang bisa mendekatkan dan mempertemukan berbagai elemen politik di atas menjadi suatu kekuatan yang relatif padu selama transisi menuju demokrasi.²⁰

Pemerintahan yang sedang mengalami transisi demokrasi seperti Rezim Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra dihadapkan dua pilihan. Pertama, menjalani transisi demokrasi dengan tingkat konsolidasi elite yang padu (solid) ke arah satu tujuan tercapainya demokratisasi politik. Kedua, menjalani transisi demokrasi yang berliku-liku dengan tingkat kepaduan elite sangat rapuh, penuh konflik dan gejolak politik massa.

¹⁷Mochtar Mas'ood. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES. hal 93-94

¹⁸ Guillermo O' Donnell dan Phillippe C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi* (Jakarta: LP3ES, 1993) dalam Kris Nugroho, “Konsolidasi Demokrasi”, *JURNAL MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK*. Surabaya. Universitas Airlangga. Diakses dari: http://mkp.fisip.unair.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=94:konsolidasi-demokrasi&catid=34:mkp&Itemid=61 (diakses pada tanggal 5 Mei 2014).

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

Sedangkan makna transisi demokrasi berarti fase peralihan atau perubahan dari suatu fase tertentu ke fase yang lain yang tak sama dengan fase pertama. Secara kongkrit, transisi demokrasi diartikan sebagai fase peralihan regim politik dari tipe otoriter menuju regim politik pasca otoriter. Menurut Guillermo O'Donnell, masa transisi umumnya ditandai dengan munculnya liberalisasi, yaitu proses pengefektifan hak-hak tertentu yang melindungi individu dan kelompok-kelompok sosial dari tindakan sewenang-wenang atau tidak sah yang dilakukan negara atau pihak ketiga. Dengan demikian, liberalisasi dikaitkan dengan iklim pengembangan kebebasan hak-hak untuk menjalin atau mendapatkan akses politik yang lebih luas dari masyarakat. Hal ini bisa berarti liberalisasi politik dalam konteks timbulnya pluralisme politik.²¹

Dalam bahasa Giovanni Sartori pluralisme politik diidentikkan dengan "*diversification of power*" yaitu kondisi di mana distribusi kekuasaan politik terpecah di sejumlah kekuatan-kekuatan atau kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat.²² Atau dengan kata lain, tidak ada lagi monopoli kekuasaan politik di satu struktur kekuasaan tertentu (monolitik). Yang terjadi adalah dinamika peta isu-isu politik dan kepentingan, masyarakat terbelah ke dalam asosiasi-asosiasi kepentingan yang saling berkonflik, berkonsensus dan bahkan bertoleransi untuk mencapai keseimbangan baru.²³

Berikutnya adalah proses demokratisasi politik, yaitu mengacu pada proses-proses di mana aturan-aturan dan prosedur-prosedur kewarganegaraan diterapkan pada lembaga-lembaga politik secara stabil. Meminjam istilah Huntington, demokratisasi dikaitkan dengan institusionalisasi politik di mana tuntutan-tuntutan serta dukungan-dukungan politik dari publik mendapat tempat secara prosedural dalam kerangka suatu penyelesaian konflik. Masa transisi sangatlah kritis sebab tak

²¹ *Ibid.*

²² Sartori, Giovanni, "Understanding Pluralism," *Journal of Democracy*, Vol. 8, No. 4, October 1997. dalam Kris Nugroho, "Konsolidasi Demokrasi", *JURNAL MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK*. Surabaya. Universitas Airlangga. diakses dari: http://mkp.fisip.unair.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=94:konsolidasi-demokrasi&catid=34:mkp&Itemid=61 (5 Mei 2014)

²³ *Ibid.*

ada jaminan bahwa proses transisi akan selalu menghasilkan regim demokratis. Pergolakan-pergolakan internal yang disebabkan faktor-faktor ekonomi, budaya dan politik berpeluang menjadi ketidakpuasan massal yang mengancam kohesi sosial masyarakat. Begitu pula, sikap-sikap politik otoriter akan kembali lagi berkuasa bilamana kohesi regim transisi lemah atau tidak kredibel secara politik sehingga mendorong kekuatan-kekuatan pro regim lama yang otoriter bangkit kembali.

Di Thailand, transisi demokrasi dimulai dengan krisis ekonomi domestik yang berdampak pada krisis keuangan dan perbankan serta munculnya penolakan publik terhadap pemerintah, yakni Yingluck sebagai Perdana Menteri dan Partainya. Penolakan massa atas simbol-simbol regim ini menggoyahkan legitimasinya yang dibangun atas dasar hasil kemenangannya pada Pemilu sebelumnya.

Dalam konteks perubahan politik dan dikaitkan terjadinya gelombang demokratisasi politik yang melanda banyak sistem politik di era 1990-an, transisi demokrasi ditandai dengan munculnya regim-regim politik baru di kawasan Asia, Amerika Latin dan Afrika yang sedang bergerak menuju demokrasi. Hal lain mengapa konsolidasi demokrasi perlu dilakukan adalah untuk membangun regim demokratis yang kuat dan melembaga setelah runtuhnya regim otoriter. Setelah regim otoriter berakhir, situasi politik tidak menentu, fragmentasi sipil, militer frustrasi dan merasa terpojokan atas perannya mendukung regime masa lalu dan norma, aturan dan prosedur (*rule of the game*) baru yang mewakili sistem demokrasi belum terbentuk. Itulah sebabnya konflik-konflik menjadi terbuka dan sulit dikendalikan mengingat penguasa baru belum punya pijakan politik yang bisa absah diterima semua kelompok politik guna melembagakan konflik-konflik politik yang muncul.²⁴ Dengan demikian, tahapan berikutnya yang dilakukan penguasa demokratis baru setelah pemerintahan

²⁴Kris Nugroho, "Konsolidasi Demokrasi", JURNAL MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK Universitas Airlangga, Volume 14, Nomor 2:25-34. Diakses dari: http://mkp.fisip.unair.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=94:konsolidasi-demokrasi&catid=34:mkp&Itemid=61. (5 Mei 2014)

otoriter runtuh adalah dibangunnya regime demokratis yang meliputi nilai, norma dan institusi demokrasi serta pengkonsolidasian regime demokratis baru.²⁵

Asumsi di balik perlunya konsolidasi demokrasi adalah lemahnya kekuatan-kekuatan sipil demokrasi, yang di awal keruntuhan rezim otoriter tercerai-berai akibat pandangan politik yang beragam, mereka berangkat dari kepentingan dan motivasi serta ideologi politik yang juga berbeda. Di samping itu, visi elite menyangkut prioritas kebijakan-kebijakan politik apa yang harus diambil di era transisi belum terbentuk atau kalau pun ada masih cenderung terpolarisasi. Mengutip pendapat Chalmers Johnson, dalam era perubahan politik, khususnya revolusi dan reformasi politik besar, ketidakseimbangan selalu muncul yakni suatu situasi di mana nilai-nilai, persepsi-persepsi atau kepercayaan-kepercayaan para elite politik, masyarakat, institusi-institusi politik dan sistem ekonomi tidak tersinkronisasi dan tidak saling memperkuat. Dengan situasi tersebut, konflik-konflik politik acapkali berlangsung terbuka.

Prioritas politik menyangkut arah transisi demokrasi menjadi faktor penting yang harus disepakati oleh para elite politik. Dalam permasalahan ini (transisi demokrasi), kata reformasi politik menjadi substansial karena tujuan selama fase transisi adalah menghadirkan regim politik baru dengan prioritas kebijakan-kebijakan reformasi politik besar. Kebijakan-kebijakan reformasi politik besar ini meliputi empat aspek.²⁶

1. Hubungan antara negara dan masyarakat, khususnya basis yang dipakai negara untuk memperoleh respon-respon masyarakat terhadap pemerintah-perintahnya, yaitu basis legitimasi dan dukungan;

²⁵ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga* (Jakarta: Grafiti, 1995)

²⁶ Michel Oksenberg dan Dickson J. Bruce. *Kerangka Teoritis Reformasi Politik* (terj) New York, Harper-Collins Publishers. 1991 dalam Kris Nugroho, "Konsolidasi Demokrasi", *JURNAL MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK Universitas Airlangga*, Volume 14, Nomor 2:25-34. Diakses dari: http://mkp.fisip.unair.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=94:konsolidasi-demokrasi&catid=34:mkp&Itemid=61 (5 Mei 2014)

2. hubungan antara negara dan ekonomi;
3. distribusi kekuasaan dan otoritas di antara dan di dalam institusi-institusi politik dan kenagaraan yang utama (kepala negara, militer, kehakiman, kelompok-kelompok kepentingan, partai-partai politik, birokrat pusat, daerah dan lokal);
4. hubungan antara sistem ekonomi dan sistem politik negara dengan dunia luar.

1.5.2. KONSEP MILITER DALAM POLITIK

Inti pandangan Huntington sendiri mengelompokkan tentara dalam kerangka hubungan sipil-militer menjadi dua yaitu, *tentara pretorian* dan *tentara profesional*.²⁷ Tentara pretorian atau tentara jenis penakluk (warior) dalam hal ini mewakili kelompok militer yang berkuasa dan menjalankan pemerintahan dan menentukan keputusan-keputusan politik. Paham ini tumbuh dan berkembang sebelum abad ke-19 ketika profesi perwira sebagai pengelola kekerasan (*manager of violence*) masih merupakan monopoli para kerabat istana. Munculnya revolusi Perancis 1789, menandai perubahan dari “tentara pencari keuntungan materi” menjadi “tentara karena panggilan suci, misalnya mengabdikan negara”, hal inilah yang kemudian dikemukakan oleh Huntington sebagai awal berkembangnya paham tentara profesional. Sebenarnya pandangan ini tidak saja dinyatakan oleh Huntington, namun jauh sebelumnya seorang ilmuwan Perancis, de Tocqueville telah berbicara tentang “profesi militer” dan “kehormatan militer”.

Huntington juga memberikan elaborasi tentang tumbuhnya profesionalisme militer yang menurutnya memiliki tiga ciri pokok, yaitu²⁸ :

1. Mensyaratkan suatu keahlian, sehingga profesi militer menjadi kian spesifik serta memerlukan pengetahuan dan keterampilan.
2. Seorang militer memiliki tanggung jawab sosial yang khusus, artinya seorang perwira militer disamping memiliki nilai-nilai moral yang tinggi

²⁷Huntington, Samuel P. *The Soldier and The State: The Theory and Politics Civil-military Relations*, Harvard University Press, Cambridge, 1957 Hal. 6

²⁸Ibid hal. 7-18

dan terpisah dari insentif ekonomi juga mempunyai tugas pokok kepada negara. Berbeda dengan masa sebelumnya, dimana seorang perwira seakan-akan menjadi milik pribadi komandan dan harus setia kepadanya sebagai suatu bentuk disiplin mati. Pada masa profesionalisme, seorang perwira berhak untuk mengoreksi atasannya, jika si atasan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

3. Karakter korporasi (*corporate character*) para perwira yang melahirkan rasa esprit de corps yang kuat.

Ketiga ciri militer profesional di atas pada akhirnya melahirkan apa yang disebut oleh Huntington "*the military mind*" yang menjadi dasar bagi hubungan militer dan negara. Hal ini melahirkan suatu pengakuan akan "Negara Kebangsaan" (*nation state*) sebagai suatu bentuk tertinggi organisasi politik. Sehingga inti dari military mind adalah suatu ideologi yang berisi pengakuan militer profesional terhadap supremasi pemerintahan sipil. Bagi perwira militer, tidak ada kemuliaan yang paling tinggi, kecuali kepatuhan kepada negarawan sipil. Jadi menurut Huntington, kaum militer yang melakukan intervensi politik pada hakikatnya menyalahi etik militer profesionalnya. Bahkan Huntington menganggap intervensi militer dalam politik sebagai tanda adanya *political decay* (pembusukan politik), dan dianggap sebagai suatu kemunduran ke arah "masyarakat pretorian."²⁹

Beberapa ahli mengkritik pandangan Huntington tersebut dengan menentang konsep "*the new professionalism of internal security and nation development*" sebagai bentuk peranan baru tentara pada negara-negara yang baru merdeka.³⁰ Termasuk dalam kelompok penentang Huntington adalah John J. Johnson, *The Role of the Military in Underdeveloped countries* yang mewakili

²⁹Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies*, Yale University Press, New Haven, 1968. Diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh CV. Rajawali, dengan judul Tertib Politik dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, Jakarta, 1983. Hal 34

³⁰Konsep Alfred Stephan, Lihat dalam buku karangan Salim Said, Hubungan Sipil-Militer dan Demokrasi: Pengalaman Indonesia; Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini dan Kelak Bab 36, Jakarta, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2001, hal. 276.

beberapa ilmuwan barat yang bukan saja simpatik terhadap keterlibatan politik kaum militer, tapi bahkan menganggapnya sebagai hal yang paling wajar dan paling baik untuk negara Dunia Ketiga karena tentara dianggap sebagai Agen Modernisasi, suatu golongan elit yang paling modern, baik dalam orientasi nilai maupun organisasi.³¹ Proponen intelektual dari kelompok ini adalah Edward Shills dan Lucian Pye sedangkan ilmuwan senior lainnya, Morris Janowitz, lebih kritis dan kondisional dari kedua rekannya itu.³² Sebagai “*the modernizing elite*”, kaum militer juga dinilai melihat jauh ke depan, dan adalah dalam kepentingan korporasinya untuk mendorong modernisasi di negaranya. Komitmen perwira dalam pembangunan ekonomi juga dihubungkan dengan latar belakang sosial para perwira yang sebagian besar berasal dari kalangan menengah, sehingga kadangkala kaum militer menjadi satu-satunya alternatif terhadap sistem politik demokrasi parlementer yang tidak stabil dan tidak bisa diandalkan untuk menjadi motor pembangunan ekonomi.

Huntington menjawab hal tersebut dalam bukunya yang diterbitkan tahun 1968, *Political Order in Changing Societies*. Buku karangan Huntington dalam banyak hal memang menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat teoritis, namun kurang dapat menjelaskan kritik-kritik empiris dan komparatif yang ditujukan kepadanya. Kemudian Amos Perlmutter, seorang yang dapat disebut penganut teori Huntington atau *Huntingtonian*, melengkapi kerangka teoritis Huntington dengan studi kasus maupun perbandingan empiris dalam menjawab kritikan yang bersifat empiris atas teori Huntington. Dalam beberapa bukunya Perlmutter bahkan mempertajam teori-teori Huntington seraya menambahkan tipologi ketiga dari militer

³¹John J. Johnson, *The Role of the Military in Underdeveloped Countries*, Princenton University Press, Princenton, 1962. Hal 6

³²Lihat artikel teoritis Edward Shills, “*The Military in the Political Development of the New States*”, dan Lucian Pye, “*Arimies in the Process of Political Modernization*”, dalam tulisan Johnson, *Ibid*, masing-masing halaman 7-67 dan halaman 69-89. Tulisan Janowitz dapat dilihat dalam buku Morris Janowitz, *The Military in the Political Development of New Nations, An Essay in Comparative Analysis*, University of Chicago Press, Chicago, 1964.

yaitu *tentara profesional revolusioner*.³³ Jenis tentara ini dianggapnya berbeda dengan tentara profesional klasik, seperti di Barat pada umumnya. “Tentara Revolusioner” memiliki suatu perbedaan pokok dengan tentara profesional klasik dan tentara Pretorian yakni tidak adanya prinsip eksklusif dalam rekrutmen dan promosi perwira militernya.

Dalam menjawab kritikan mengenai sifat korporasi militer untuk mendorong modernisasi di negaranya, serta keterkaitan dengan latar belakang bahwa sebagian perwira militer berasal dari golongan menengah, Huntington maupun oleh Perlmutter memang kurang membahas masalah tersebut dengan baik, karena mereka menganggap bahwa variabel sosial ekonomi sebagai hal yang terpisah dari variabel politik institusional. Sehingga dengan sengaja keduanya tidak membahas masalah pembangunan ekonomi ini. Tetapi Nordlinger melihat bahwa sifat korporasi militer justru mendorongnya untuk melakukan intervensi politik, yang bisa saja berlangsung secara bertahap, sehingga suatu tentara pretorian dapat berubah menjadi “*the ruler army*” dalam waktu beberapa tahun.³⁴ Mengenai korelasi positif antara kaum militer dengan reformasi golongan menengah, Nordlinger tidak membenarkan seluruhnya pandangan ini, menurutnya justru kepentingan dan identitas kaum militer dengan golongan menengah membuatnya menjadi kelompok yang konservatif, sehingga untuk melihat korelasi yang tepat, harus dihubungkan dengan ukuran dan besar kelompok menengah di suatu negara. Jika kaum militer yang berasal dari kalangan menengahnya besar, maka kaum militer bisa saja menjadi agen modernisasi, tetapi sebaliknya bila kaum militer dari kaum menengah sangat kecil, maka kaum militer akan menjadi sangat konservatif. Kaum militer di negara demikian, bisa saja menentang kelompok ologarki kalangan atas (*upper class*), tapi pada saat yang bersamaan membela kepentingan golongan menengahnya terhadap ancaman dari

³³Amos Perlmutter, *The Military and Politics and Modern Times: On Professionals, Praetorians and Revolutionary Soldiers*, Yale University Press, New Haven dan London, 1977, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Militer dan Politik*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hal 297.

³⁴Eric A.Nordlinger, *Soldiers in Politics: Military Coups and Government*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1977. Hal. 309

kalangan bawah (*lower class*).³⁵ Alasan lainnya yang mencegah kaum militer menjadi reformis adalah tentang sifat-sifat korporasi militer, sehingga kelompok militer adalah suatu kelompok kepentingan yang paling kuat di negara-negara Dunia Ketiga. Demikian pula dengan nilai-nilai militer yang menekankan ketertiban dan stabilisasi, bertentangan dengan semangat reformasi yang memerlukan perubahan yang berkesinambungan.

Mengamati proses transisi menuju demokrasi untuk kasus Thailand akan nampak bahwa fase transisi demokrasi akan ditempuh relatif panjang dan bergejolak. Diwarnai konflik elite politik, konflik primordial dan ancaman-ancaman pemisahan diri dari beberapa propinsi (Daerah Selatan yang berbatasan dengan Malaysia yang didominasi oleh penduduk mayoritas beragama Islam, yang notabene berbeda dengan mayoritas penduduk Thailand (95%) yang beragama Budha), transisi demokrasi di Thailand berlangsung dalam konteks rendahnya kohesi sosial.

Hal ini nampak sejak awal tampilnya perselisihan yang tidak kunjung berakhir antara partai bentukan Keluarga Thaksin Sihinawatra dan militer, menegaskan bahwa transisi demokrasi Thailand masih jauh dari adanya kepaduan misi politik guna menyukseskan demokratisasi politik. Kini garis kepentingan politik ditentukan oleh sejauhmana terjalin titik temu yang sama di antara kekuatan-kekuatan politik untuk melancarkan tindakan politik bersama ke arah suatu kepentingan politik tertentu. Misalnya, politisasi kasus korupsi Yingluck guna mengejar Perdana Menteri beserta rezimnya sampai pada tingkat bersalah sehingga layak di-impeachment-kan, terlebih setelah MK memutuskan untuk menolak hasil Pemilu Februari 2014 yang semakin melemahkan legitimasi rezim Yingluck sebagai penguasa Thailand.

Titik krusial dinamika politik saat ini adalah bagaimana elite-elite politik menyadari betapa berat konsekuensi yang akan terjadi jika halangan-halangan demokrasi tidak bisa diatasi. Sistem yang tengah dibangun akan ambruk secara

³⁵Eric A. Nordlinger, "Soldiers in Mufti: The Impact of Military Rule upon Economic and Social Change in the Non-Western States", dalam *American Political Science Review*, Desember 1970. Hal 45

politik kalau misalnya wilayah-wilayah yang bergolak memilih eksistensi politiknya sendiri. Tatanan politik juga terancam hancur jika tensi pergolakan politik kedaerahan tumpang tindih dengan kepentingan-kepentingan politik lokal dan nasional sehingga tidak mampu diselesaikan secara damai.

Memburuknya situasi politik ini jelas akan memudarkan rentang kendali legitimasi PM Yingluck. Pemerintah mulai kehilangan kontrol kewenangan politiknya atas masyarakat. Kewibawaan pemerintah pun dipertanyakan mengingat ketidakmampuannya mengendalikan konflik-konflik horisontal yang saat ini masih sering terjadi di wilayah selatan Thailand.

Dengan demikian, masa transisi menuju demokrasi di Thailand cenderung akan berjalan keras atas dasar pertimbangan konvergensi faktor struktural dan kultural berikut : ketiadaan kewibawaan hukum, pijakan norma-norma demokrasi masih lemah, perbedaan tafsir elite atas arah reformasi politik, adanya elite-elite oportunistik yang hanya sekedar ingin berkuasa dan potensi tak terkendali aksi-aksi kekerasan massa yang dengan mudah menyulut terjadinya kerusuhan sosial. Konvergensi demikian dalam kenyataannya telah menghasilkan pusaran dinamika politik yang sangat destruktif bahkan di beberapa wilayah, tertib politik terancam runtuh.

Ancaman ambuknya institusi demokrasi ini dimungkinkan selain karena gagalnya resolusi konflik, juga dimungkinkan oleh makin banyaknya konflik-konflik sosial politik yang cenderung diselesaikan lewat jalur non institusional (kekerasan). Politik kekerasan ini tak harus berwujud fisik, tapi juga ancaman-ancaman ideologi dan penggunaan bahasa (jargon politik) sebagai pembenar kekuasaan politik tertentu.

Adanya perilaku elite baik di dalam pemerintah dan di luar pemerintah yang masih menggunakan bahasa-bahasa ancaman seperti ini dan pemberlakuan jam malam untuk mengendalikan arus demonstrasi dan pengerahan massa oposisi, menggambarkan betapa institusi demokrasi Thailand saat ini sedang di ambang keambukannya. Seiring gejala ini, kewibawaan pemerintah, institusi politik dan hukum makin menurun, setidaknya hal ini terlihat dari kecenderungan masyarakat

menggunakan cara-cara kekerasan sebagai jalan keluar menyelesaikan suatu masalah. Hal menggambarkan juga, betapa legitimasi politik dan hukum sudah di ambang keambrokannya. Dengan sendirinya, legitimasi pemerintah pelan-pelan mulai tercabut dan membuat pemerintahan saat ini terlalu sulit untuk mengonsentrasikan diri guna melakukan konsolidasi demokrasi secara luas.

Secara politik, kewibawaan PM Yingluck Shinawatra sudah tidak ada apa-panya dengan jangkauan kekuasaan politik yang makin memudar. Pada saat yang sama ia dituntut untuk menggolkan salah satu misi reformasi, yaitu pengusutan kasus dugaan korupsi Kakaknya yakni Mantan PM Thaksin Shinawatra dan kroni-kroninya. Tapi pada saat yang sama politisasi atas Penolakan Hasil Pemilu oleh MK Thailand dan pengusutan dugaan kasus korupsi Yingluck Shinawatra sendiri oleh pengadilan Thailand membuat citranya makin merosot.

Keberhasilannya untuk memulihkan kredibilitas politik pemerintahannya tergantung pada kemampuannya membalik arah pendulum politik, dari pihak yang diserang menjadi pihak yang mengendalikan dan menyerang musuh-musuhnya. Tapi kalau tidak, posisinya sebagai Perdana Menteri tidak akan bertahan lama.

Dengan demikian dapat dikatakan, transisi demokrasi merupakan titik krusial yang harus dilalui dengan aman di mana respon-respon elite terhadap persoalan-persoalan politik domestik harus menghasilkan konsensus minimal atau political pact antar aktor politik yang berkonflik.³⁶ Artinya antar elite harus tercipta kondisi politik yang kondusif bagi lahirnya komitmen untuk menyelamatkan arah reformasi politik dengan munculnya kesepakatan-kesepakatan minimal menyangkut persoalan-persoalan reformasi domestik. Skala prioritas politik apa yang harus diwujudkan di awal transisi juga harus dirundingkan di antara elite tanpa mengurangi hak-hak dan kewenangan politik pihak yang memegang kendali pemerintahan.

³⁶ Kris Nugroho. "Konsolidasi Demokrasi", JURNAL MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK Universitas Airlangga, Volume 14, Nomor 2:25-34. Diakses dari: http://mkp.fisip.unair.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=94:konsolidasi-demokrasi&catid=34:mkp&Itemid=61 (5 Mei 2014)

Dalam konteks perubahan politik yang cepat dan terfragmentatif seperti di Thailand ini, tepatlah kalau elite mengembangkandemokrasi konsosional (*consosional democracy*) Inti demokrasi konsosional ini adalah rivalitas antar politik yang saling mengakui bahwa mereka memiliki perbedaan-perbedaan yang esensial yang perlu diselesaikan. Dari sinilah muncul kebutuhan untuk saling mengakui eksistensi setiap segmen politik yang ada sehingga yang muncul adalah pergolakan politik transisional yang terkendali tanpa mengorbankan hakekat reformasi itu sendiri. Untuk itu arah pergolakan politik harus berubah dari corak *zero sum conflict* ke *non-zero sum conflict* di mana terdapat konsensus-konsensus guna menyelamatkan arah reformasi politik.

Untuk itu, arah permainan politik harus berubah di dua arah, dari arah penguasa yang harus secepatnya mengubah gaya permainan politiknya dengan menciptakan “solusi damai“ dengan poros-poros kekuasaan yang kini dijauhinya dan dari arah oposisi (pimpinan Abhisit Vejjajiva) yang cenderung konfrontatif terhadap penguasa. Solusi damai ini setidaknya untuk meminimalkan korban-korban kemanusiaan yang terjadi selama proses transisi demokrasi. Solusi damai ini artinya, Yingluck Shinawatrah harus melakukan konsolidasi demokrasi, dengan langkah-langkah sebagai berikut : Pertama, melakukan konsolidasi antar kekuatan politik guna mencapai konsensus minimal politik guna menggagas reformasi kongkrit yang diinginkan oleh kubu Oposisi pimpinan Abhisit yang didukung oleh militer Thailand. Kedua, berinisiatif pranata-pranata sosial politik yang hancur di wilayah-wilayah konflik di Thailand Selatan, setidaknya hal ini akan mengurangi sumber-sumber ketegangan politik di daerah. Ketiga, membuka jalur dialog multi poros politik, setidaknya untuk menghindari frustrasi politik pihak-pihak yang tidak terakomodasi dalam pemerintahannya.

1.6 ARGUMEN UTAMA

Berdasarkan permasalahan yang penulis ajukan maka argumen utama penulis adalah:

Dampak yang terjadi dari pembatalan hasil Pemilu 2 Februari 2014 oleh Mahkamah Konstitusi Thailand adalah:

1. Krisis politik yang berkelanjutan karena konsolidasi demokrasi tidak berhasil di laksanakan.
2. Intervensi militer dalam krisis politik yang berpanjangan hingga kudeta militer kembali menduduki Thailand.

1.7 METODE PENELITIAN

Dalam penelitian karya ilmiah metode merupakan salah satu syarat untuk melakukan penelitian. Penerapan metode bermanfaat untuk mendapatkan kerangka berpikir dan data-data yang dibutuhkan dengan tujuan agar karya tulis menjadi ilmiah, sistem dan kronologis.

Agar suatu penelitian dapat terarah dan mendapatkan hasil yang optimal dan sesuai dengan apa yakni, diharapkan, maka diperlukan metode yang tepat. Menurut **Liang Gie** metodologi adalah sebagai berikut :

“Cara atau langkah yang berulang kali sehingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan tentang suatu gejala pada ujung awalnya. Ini merupakan cara atau langkah untuk mengumpulkan data-data, sedangkan pada ujung akhirnya untuk meluruskan kebenaran pernyataan yang disebut mengenai gejala tersebut.”³⁷

Berdasarkan definisi di atas, metode dapat disimpulkan sebagai suatu kerangka konseptual yang diterapkan pada penelitian yang dinilai dari proses pengumpulan data sampai dengan penganalisaan data sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu keberadaan dengan tingkat variabel atau gejala yang ada. Untuk memperoleh kebenaran suatu penelitian maka sangat diperlukan adanya data yang

³⁷ Liang Gie. 1984. *Ilmu Politik: Suatu Pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan dan Metodologi*. Yogyakarta:Gajah Mada university Press, hal 81

berisikan tentang fakta-fakta yang ada di lapangan. Metode yang digunakan dalam penulisan tentang karya tulis ilmiah ini ada ketegori yaitu metode pengumpulan data dan motede analisa data.

1.7.1 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan data-data sekunder yang berarti data-data pengamatan terhadap objek yang diteliti tidak diperoleh secara langsung, tetapi didapatkan melalui buku-buku terbitan, artikel atau buletin dan pemberitaan oleh media massa serta informasi-informasi yang ada di internet. Dengan demikian metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode penelitian perpustakaan atau *library research*.

Tempat-tempat yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
2. Perpustakaan FISIP Universitas Jember
3. Surat kabar, buku terbitan dan media internet

1.7.2 METODE ANALISIS DATA

Penelitian harus menggunakan proses berpikir yang baik untuk mendapatkan hasil yang baik juga. Berpikir adalah suatu proses mencari korelasi di antara berbagai ilmu pengetahuan untuk mengorganisasikan dan mereorganisasikan sehingga dapat menginstruksikan yang terdapat dalam tataran tertentu dan nantinya dapat dikembangkan kembali.

Penulis menggunakan metode *deskriptif* dalam menganalisa data. *Deskriptif* adalah upaya untuk menjawab pertanyaan siapa, apa, di mana, kapan, atau berapa; jadi merupakan upaya melaporkan apa yang terjadi.³⁸ Berangkat dari konsep konsolidasi politik dan intervensi militer dalam politik yang penulis gunakan, penulis mencoba membuat argumen utama tentang latar belakang apa saja yang membuat krisis politik di Thailand semakin memanas dan dampaknya terhadap transisi

³⁸*Ibid.* hal 68

demokrasi di negara tersebut, yang pada akhirnya menguji argumen utama tersebut dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.

Penulis menganalisa data dengan menggunakan *level analisa Nation State* sebagai kerangka analisa permasalahan dikarenakan pada *level analisa Nation State* ini mengasumsikan bahwa semua pembuat keputusan di mana pun berada pada dasarnya berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama. Penulis menganalisa proses konsolidasi demokrasi di Thailand yang masih tidak berjalan mulus dengan seringnya konflik politik yang terjadi setiap proses pergantian kepemimpinan politik di negara tersebut.

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang akan lebih diuraikan lagi lebih dalam yang terdiri dari:

BAB I: Berisi tentang Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Pembahasan, Rumusan Masalah, Kerangka Konseptual, Hipotesis, Metode Penelitian, Tujuan Penelitiandan Sistematika Penulisan.

BAB II: Gambaran Krisis Politik di Thailand. Pada bab dua ini akan dijelaskan bagaimana kronologi krisis politik di Thailand antara pro dan anti pemerintahan yang menyebabkan kebuntuan politik pada masa pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra.

BAB III: Pelaksanaan Pemilu 2 Februari 2014. Pada bab ini menjelaskan bagaimana sistem pemilu di Thailand, pelaksanaan pemilu dini 2 Februari yang kacau hingga MK membatalkan hasil pemilu 2 Februari yang dianggap sebagai solusi penyelesaian krisis politik yang terjadi di Thailand.

BAB IV: Dampak dibatalkannya hasil Pemilu 2 Februari 2014 terhadap penyelesaian krisis politik di Thailand. Pada bab ini akan menjawab pertanyaan apa dampak pembatalan hasil pemilu 2 Februari 2014 oleh MK terhadap penyelesaian krisis politik di Thailand

BAB V: Berisi kesimpulan dari permasalahan di atas.

BAB II. GAMBARAN KRISIS POLITIK DI THAILAND

Tahun 2014 menjadi tahun yang suram dalam sejarah perpolitikan Thailand. Di tahun ini terjadi kudeta militer setelah demonstrasi besar-besaran dan berkepanjangan dari kelompok oposisi sejak tahun 2013. Demonstrasi tersebut berdampak pada tumbangnya rezim Pemerintahan Yingluck Sinawathra, adik dari Thaksin Sinawatra mantan PM Thailand yang juga harus turun dari kursi PM negara tersebut setelah menerima kenyataan juga dikudeta oleh militer pada tahun 2006. Sejak akhir tahun 2013, para demonstran anti pemerintah, yang menamakan dirinya kelompok “Kaus Kuning” mulai turun Bangkok, menggelar protes besar menuntut Perdana Menteri Yingluck yang berkuasa untuk mundur, menuntut adanya pembubaran parlemen, dan digelarnya reformasi total karena menganggap pemerintahan Yingluck telah koruptif. Penjelasan mengenai gambaran krisis politik Thailand akan disajikan pada bab ini.

2.1 KRONOLOGI KONFLIK POLITIK DI THAILAND PADA MASA PM YINGLUCK SINAWATRA

Pemerintahan yang dipimpin oleh Yingluck Sinawatra mendapat penolakan dari beberapa golongan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ribuan massa pengunjung rasa dari kelompok oposisi anti-pemerintah mengepung berbagai kantor pemerintah dalam protes yang mewacanakan penggulingan pemerintah dan mengakhiri apa yang dianggap sebagai pengaruh lanjutan perdana menteri terguling, Thaksin Shinawatra. Para pengunjung rasa penentang pemerintah Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, yang jumlahnya diperkirakan mencapai 30 ribu orang memenuhi jalanan ibukota Thailand, Bangkok yang menyebar ke 13 lokasi di seluruh Bangkok, melumpuhkan lalu lintas, membuat warga dan turis khawatir terjadi kerusuhan.³⁹ Kepala Dewan

³⁹Elin Yunita Kristanti. 25 November 2013. Dipicu RUU Amnesti, Bangkok Kembali Diguncang Demo. Diakses dari: <http://news.liputan6.com/read/755849/dipicu-ruu-amnesti-bangkok-kembali-diguncang-demo> (2 Agustus 2014)

Keamanan Nasional Thailand Paradorn Pattanathabutr mengatakan ada ratusan ribu pendemo yang turun ke jalanan Ibukota Bangkok selama protes yang sudah berlangsung sejak November 2013 itu dan menjadi protes politik yang paling signifikan di Thailand sejak unjuk rasa berdarah pada 2010.⁴⁰

Demonstran menolak RUU kontroversial tentang amnesti politik yang dimaksudkan untuk mereka yang melakukan pelanggaran selama dan setelah kudeta Thailand tahun 2006, yang melengserkan Thaksin. Kontroversi RUU Amnesti Politik yang didukung pemerintah tersebut disebut-sebut sebagai pemicu memanasnya krisis politik Thailand. Kelompok Oposisi menilai, legislasi UU itu adalah sebagai kedok dalam upaya memberi peluang mantan PM Thailand Thaksin Sinawatra (yang tidak lain adalah kakak kandung PM Yingluck Shinawatra) untuk kembali ke Thailand tanpa menjalani hukuman kasus korupsi.

Senat Thailand menolak RUU mengenai Amnesti yang sebelumnya telah disahkan. Pada 1 November 2013, senat Thailand menyetujui undang-undang yang akan memberikan amnesti untuk kejahatan yang dilakukan selama periode kerusuhan politik di negara itu setelah penggulingan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra oleh kudeta militer pada tahun 2006.⁴¹ RUU tersebut diajukan oleh partai berkuasa, Pheu Thai yang menurut pemerintahan perdana menteri Yingluck RUU tersebut adalah langkah penting menuju proses rekonsiliasi. Definisi luas amnesti bagi pelanggaran terkait politik akan mencakup orang-orang yang menembaki demonstran pada tahun 2010, serta Thaksin sendiri yang lari ke luar negeri sejak dituduh korupsi.

Kritik terhadap RUU tersebut dipimpin oposisi, Partai Demokrat yang berpendapat bahwa aturan baru diusulkan untuk memfasilitasi kepulangan Thaksin,

⁴⁰Natalia Santi. 26 November 2013. Bangkok Situasi Darurat, Dubes RI Imbau WNI Patuh. Diakses dari: <http://www.tempo.co/read/news/2013/11/26/118532452/Bangkok-Situasi-Darurat-Dubes-RI-Imbau-WNI-Patuh> (2 Agustus 2014)

⁴¹Wendy Zeldin. 12 Nov 2013. *Thailand: Draft Amnesty Law Approved by House Likely to Be Turned Down by Senate*. Diakses dari: http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_l205403753_text (2 Agustus 2014)

tanpa keharusan menjalani hukuman penjara dan membuka peluang bagi para pelanggar HAM untuk tidak menerima hukuman. Pihak pemerintah kemudian tidak lagi memperjuangkan RUU tersebut yang sudah terlanjur memicu protes jalanan, perpecahan politik, dan meningkatkan momok kekacauan politik baru di negara Asia Tenggara itu. Namun, desakan mundur kepada PM Yingluck terus digulirkan oleh kelompok oposisi. Akan tetapi Yingluck menolak untuk menyerahkan jabatannya sebagai PM Thailand dan tidak punya niatan untuk membubarkan DPR. Yingluck kemudian berusaha meyakinkan para penentang pemerintah dengan upaya tawaran untuk bernegosiasi untuk menemukan cara yang damai demi kepentingan negara Thailand. Namun, kelompok oposisi justru memberikan reaksi berbeda yang jauh lebih keras atas tawaran berdamai dari pemerintah itu. Partai Demokrat mengatakan bahwa 153 anggota parlemen dari 500 kursi di parlemen mengundurkan diri untuk memprotes apa yang disebut "ketidakabsahan" dari pemerintah Perdana Menteri Yingluck Shinawatra.⁴²

2.2 KONFLIK POLITIK THAILAND: KELUARGA THAKSIN VS PARTAI DEMOKRAT

Krisis politik di Thailand secara historis sejak Tahun 2002 didominasi oleh persaingan antara kubu partai keluarga Shinawatra dan Partai Demokrat (PD). Dalam sejarah kepartaian di Thailand, PD merupakan partai politik yang berjasa besar dalam mengatasi krisis ekonomi-politik 1997 dan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat.⁴³ Melalui program reformasi ekonomi, PD di bawah Pemerintahan Chuan Leekpai berhasil mengeluarkan Thailand dari cengkeraman IMF. Namun, sejak Tahun 1998, pengaruh Thaksin Sinawatra menjadi kuat dan masih bertahan hingga kini

⁴²Lindsay Murdoch. 8 Desember 2013. *Thailand's Mps Resign En Masse From Parliament*. Diakses dari: <http://www.smh.com.au/world/thailands-mps-resign-en-masse-from-parliament-20131208-hv4uq.html>. (2 Agustus 2014).

⁴³BBC.2014. "Thailand Profile" diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-asia-15641745>. (2 Agustus 2014).

melalui berbagai partai. Mulai dari Partai Thai Rak Thai (1998-2006), People Power Party (2007-2010), hingga Partai Phue Thai (2011 sampai sekarang). Ini berarti bahwa sejak 1998 partai-partai pro-Thaksin lebih banyak dan lebih lama memegang kursi pemerintahan daripada kelompok oposisi yang anti-Thaksin yang merupakan golongan kelas menengah di Thailand.⁴⁴

Dalam sejarahnya, Thailand sesungguhnya tidak bisa dilepaskan keberadaan kelas menengah yang sangat berpengaruh mewarnai kehidupan politik sedari awal pembentukan konstitusi dan perombakan pemerintahan. Gerakan kelas menengah, terutama di Bangkok, cukup signifikan mengkonstruksi wacana politik, termasuk tekanan perubahan struktur politik ketatanegaraan. Namun, dalam sejarahnya pula, tidak senantiasa apa wacana yang direproduksi dan dikapitalisir gerakan kelas menengah terhadap publik merupakan persoalan mendasar yang sungguh-sungguh sedang dihadapi rakyat Thailand. Penggunaan isu mega penjualan aset perusahaan tanpa pajak, jelas merupakan contoh wacana yang sangat elitis dan tidak banyak dipahami sebagian besar rakyat. Sementara isu-isu hak asasi manusia semacam operasi pembunuhan massal terhadap orang-orang yang diduga terlibat obat-obatan terlarang yang mencapai 1.300 orang mati tanpa melalui proses peradilan, meningkatnya kekerasan dan penghilangan orang di Thai selatan, pembangunan waduk Pak Mun Dam yang menggeser dan mengancam kehidupan ribuan penduduk desa di Thai utara, serta perjanjian liberalisasi perdagangan di bawah kendali Amerika, tidak cukup banyak diangkat oleh kelas menengah.⁴⁵ Ini menunjukkan bahwa reproduksi wacana kelas menengah tanpa dikaitkan dengan isu-isu pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini diderita rakyat sungguh sangat beresiko dalam konteks politik terkini di Thailand. Hal ini terutama dikaitkan dengan tidak cukup kuatnya dukungan publik terhadap penggulingan Thaksin, meskipun

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ International Rivers. 2015. "Pak Mun Dam" diakses dari <http://www.internationalrivers.org/campaigns/pak-mun-dam-0>. (2 Agustus 2014).

mobilisasi terus dilakukan oleh pihak oposisi yang sebagian besar berasal dari kelas menengah.

Beberapa tahun setelah penggulingan Thaksin, adiknya Yingluck kemudian maju mencalonkan diri menjadi PM Thailand, dan ternyata berhasil mendapatkan dukungan rakyat Thailand yang masih cenderung memilih partai yang berafiliasi dengan mantan PM Thaksin itu melalui kemenangan telak Partai Phue Thai yang meraih suara 60% lebih pada Pemilu Tahun 2011.⁴⁶Sementara itu, kelompok anti-Thaksin yakni Partai Demokrat telah dua kali kalah pemilu pada tahun 2007 dan 2011, meskipun partai ini telah berhasil membawa Thailand keluar dari krisis ekonomi Asia 1997.

Dalam reformasi politik 1998, PD mampu menarik simpati rakyat Thailand dan menandingi kekuatan militer. PD mendesain dan mengesahkan konstitusi baru, yaitu Konstitusi Rakyat (People's Constitution). Proses pembuatan konstitusi itu melibatkan partisipasi berbagai kelompok masyarakat, sehingga konstitusi itu menjadi salah satu warisan terpenting PD yang tidak bisa ditandingi parpol lain di Thailand. Sementara partai Thaksin Thai Rak Thai memberikan dimensi berbeda dibandingkan PD dan parpol lain. Kekuatan uang Thaksin mampu membujuk banyak politisi berpengalaman dari partai-partai lain pindah ke Thai Rak Thai. Kemenangan partai Thaksin pada Pemilu 2002 sangat mengejutkan politik Thailand, khususnya PD. Bahkan kebijakan Pemerintahan Thaksin mampu menarik simpati rakyat kecil di daerah-daerah tertentu di Thailand. Profil Thaksin ini dilanjutkan adiknya, Yingluck, ketika memenangi Pemilu 2011 mengalahkan PD. Dominasi Thaksin dalam ekonomi dan politik berakhir ketika para jenderal melakukan kudeta militer pada 2006. Abbisit Vejajjiva sebagai pimpinan PD diajukan sebagai PM Thailand.

Dinamika rivalitas antara kelompok oposisi (PD) dan pendukung Shinawatra kemungkinan akan berlangsung lama. Fragmentasi politik yang akut di antara kedua

⁴⁶BBC. 3 July 2011. *Thailand: Yingluck Shinawatra wins key election*. Diakses dari: <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-14004755>. (2 Agustus 2014).

kelompok itu juga tidak memberi peluang bagi kelompok atau partai politik lain untuk berkuasa. Tidak ada partai politik yang berani menandingi kekuatan militer Thailand, selain partai bentukan Shinawatra. Tidak ada pula parpol yang mampu memobilisasi partisipasi rakyat Thailand dalam merumuskan Konstitusi Rakyat 1998, selain PD.

Dengan kondisi struktural seperti itu, stabilitas politik Thailand masih jauh dari harapan. Resolusi konflik akan memerlukan pihak ketiga yang netral terhadap semua pihak yang bertikai. Raja Bhumibol Adulyadeh tetap tidak berpihak kepada parpol tertentu. Raja Bhumibol Adulyadej sebagai kekuatan politik lain dalam pemerintahan Monarki Konstitusional, terlebih ketika kebuntuan politik terjadi di negara itu, Raja telah berulang kali berperan sebagai pemersatu rakyat Thailand. Dalam sejarahnya, demokrasi Thailand seringkali diganggu oleh krisis politik yang berujung pada berbagai kudeta militer. Raja Bhumibol selalu berperan dalam mengembalikan demokrasi ke parlemen. Inisiatif rekonsiliasi politik seringkali datang dari Raja Bhumibol, seperti ketika Raja memanggil Jenderal Suchinda Kraprayoon, pelaku kudeta pada 1992, dan memintanya mundur.

Peran dan pilihan politik Raja Bhumibol untuk melakukan inisiatif rekonsiliasi dalam rangka menyelamatkan demokrasi Thailand sering menjadi satu-satunya harapan tersisa daripada hanya terus menyaksikan kebuntuan politik. Hal ini kembali terjadi pada saat hari ulang tahun Raja Bhumibol Adulyadej yang ke-85 pada 5 Desember 2013 yang lalu, Raja mendesak rakyat Thailand untuk saling mendukung dan rekonsiliasi bagi persatuan dan kemajuan Negara Thailand. Namun permintaan Raja Bhumibol tidak mendapat respon positif dari kelompok oposisi anti-Pemerintahan PM Yingluck yang justru mengepung Ibukota, Bangkok. Sementara itu, pemerintahan PM Yingluck tetap pada keputusannya untuk melaksanakan pemilu 2 Februari 2014 sebagai satu-satunya cara demokratis untuk mengatasi krisis politik saat itu.

2.3 KONFLIK ANTARA KAOS MERAH DAN KUNING.

Dukungan dari salah satu lapisan masyarakat dapat menjadi suatu legitimasi politik dari suatu pemerintahan. Pemerintahan Thailand ketika dipimpin oleh Thaksin Sinawatra mendapat dukungan dari golongan kelas bawah seperti petani dan buruh. Dukungan dari kelas bawah seperti petani dan buruh didapat dari kebijakan Thaksin yang akan mengembangkan demokrasi dengan kebebasan ekspresi, kebebasan pers, dan masyarakat sipil yang aktif, dimana dalam pergerakan sosial berkampanye untuk melindungi yang miskin karena pemerintahan thaksin yakin bahwa masyarakat miskin bukan merupakan suatu beban.⁴⁷ Pemerintahan Thaksin yang terkenal mendapat perlawanan dari kelompok pemodal media di Thailand adalah simpatisan kaos kuning. Sedangkan kaos kuning mengklaim kaos merah adalah antiraja; kaos kuning ini mewakili golongan kelas menengah merepresentasikan salah satu partai besar dan berkuasa di Thailand yakni Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) yang merupakan koalisi pemrotes terhadap kubu Yingluck Shinawatra, mantan Perdana Menteri Thailand yang terguling melalui kudeta militer pada Mei 2014. PAD disebut sebagai pemeran utama dalam krisis politik Thailand 2005-2006 dan krisis politik Thailand 2008.⁴⁸

Konflik yang terjadi antara kaos merah dan kaos kuning dimulai ketika Thaksin Sinawatra menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand. Ketika Thaksin Sinawatra memimpin, pemerintahan ini membuat berbagai macam terobosan kebijakan. Sebagian besar kebijakan memberikan dukungan kepada kaum-kaum miskin di Thailand. Salah satu kebijakan yang pro rakyat miskin adalah sistem jaminan kesehatan bagi seluruh warga Thailand. Berbagai kebijakan yang

⁴⁷ Giles Ji Ungpakorn. 2009. Class Struggle Between the Coloured T-Shirts in Thailand. *Journal of Asia Pacific Studies Vol. 1, No. 1, 76-100*. Hal.77.

⁴⁸ MetroTV News.Com KONFLIK ANTARA KAOS MERAH, KUNING, PUTIH, DAN HITAM- 23 Mei 2014 Prita Daneswari di akses dari <http://internasional.metrotvnews.com/read/2014/05/23/245129/konflik-antara-kaos-merah-kuning-putih-dan-hitam> (2 Agustus 2014)

dikeluarkan oleh pemerintahan Thailand membuat masyarakat miskin Thailand sangat mendukung Thaksin Sinawatra.⁴⁹Dukungan yang besar dari masyarakat miskin dan buruh memunculkan rasa kurang aman bagi elit-elit konservatif. Elit-elit konservatif yang masih memiliki pandangan bahwa raja dan mereka harus memiliki kekuasaan di Thailand, memiliki ketakutan ketika kekuasaan tersebut bergeser ke Thaksin Sinawatra karena adanya sistem demokrasi dan lebih dari itu Thaksin mendapat dukungan dari mayoritas warga thailand. Agar para elit konservatif tersebut masih tetap memiliki kuasa di Thailand mereka berniat untuk menggulingkan pemerintahan Thaksin atau melakukan kudeta. Cara-cara yang dilakukan oleh para elit yakni menggunakan media-media yang sebagian besar dimiliki oleh para elit untuk menyerang Thaksin menggunakan isu-isu korupsi. Pendukung gerakan untuk mengukudeta pemerintahan Thaksin yakni disebut sebagai kelompok kaos kuning, dimana mereka didukung oleh militer dan kerajaan.⁵⁰Adanya dua kubu yang berbeda pandangan dan kepentingan menyebabkan konflik politik di Thailand tidak dapat dihindari.

Konflik antara Kaos Merah dan Kaos Kuning tetap berlanjut meski Thaksin Sinawatra sudah tidak menjabat sebagai Perdana Menteri. Usaha untuk mengamankan kekuasaan dalam situasi politik selalu muncul di suatu negara. Ketika Kudeta terhadap Thaksin berhasil gelombang protes masih belum reda. Para pendukung Thaksin yakni kaos merah terus melakukan protes. Bahkan lebih dari itu gelombang protes juga muncul dari kelompok Kaos Kuning ketika Yingluck Sinawatra yang notabene merupakan adik dari Thaksin Sinawatra terpilih sebagai Perdana Menteri. Kelompok kaos kuning takut ketika Yingluck menjabat sebagai Perdana Menteri, Yingluck akan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sama dengan Thaksin sehingga nantinya dapat mengancam posisi kekuatan elit-elit konservatif.

⁴⁹ Giles Ji Ungpakorn, op. cit. hal. 9.

⁵⁰Ibid.

2.4 KETERLANJUTAN KRISIS POLITIK DI THAILAND

Ketegangan politik yang terjadi di Thailand sedikit mereda pada saat ulang tahun ke-86 Raja Thailand Bhumibol Adulyadej yang dirayakan di tengah krisis politik, dimana Raja meminta rakyatnya melaksanakan peran dan kewajibannya demi stabilitas dan keamanan negara. Saat itu ribuan orang menggunakan atribut serba kuning, yang menjadi simbol pendukung Raja, massa memadati Phetkasem Road, yang berada di dekat istana raja di Hua Hin demi melihat langsung pemimpinnya.⁵¹Namun, nasehat sang raja tampaknya hanya sesaat untuk dapat meredakan eskalasi konflik politik di Negara itu yang kembali memanas.

Sementara itu di pihak kelompok oposisi, mantan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva secara resmi didakwa sebagai tersangka kasus pembunuhan terkait pembubaran demonstran pada 2010, yang menewaskan lebih dari 90 orang.⁵²Abhisit yang juga pemimpin kelompok oposisi Partai Demokrat membantah dakwaan tersebut dan yakin akan mendapatkan jaminan. Surat dakwaan dikeluarkan bertepatan dengan berlangsungnya protes terhadap Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang tidak kunjung usai. Pemimpin protes anti pemerintah, Suthep Thaugsuban, yang menjadi deputi perdana menteri di masa Abhisit pada 2010, juga dikenai dakwaan tetapi dia meminta pengadilan untuk menunda sidang pembacaan dakwaannya.⁵³

Pada 28 Desember 2013, insiden berdarah kembali terjadi dimana seorang demonstran di Thailand tewas ditembak pria bersenjata misterius, di tengah melancarkan aksi demonstrasi anti-pemerintah dan beberapa demonstran lainnya pun

⁵¹Kompas. 8 Desember 2013. Unjuk Rasa Besar Digelar di Bangkok Senin. Diakses dari: <http://internasional.kompas.com/read/2013/12/08/0914437/Unjuk.Rasa.Besar.Digelar.di.Bangkok.Senin> (2 Agustus 2014)

⁵²BBC. 12 December 2013. *Former Thai PM Abhisit Vejjajiva Charged With Murder*. Diakses dari: <http://www.bbc.com/news/world-asia-25328880>. (2 Agustus 2014)

⁵³Anonim. 2 Desember 2013. *Arrest warrant issued against Thai protest leader Suthep Thaugsuban*. Diakses dari: <http://www.dw.de/arrest-warrant-issued-against-thai-protest-leader-suthep-thaugsuban/a-17267155>. (2 Agustus 2014).

terluka.⁵⁴ Demonstrasi tersebut digelar di dekat kantor pemerintah Bangkok, untuk memprotes dan mendesak PM Yingluck untuk mundur dari jabatannya. Yingluck dinilai mencoba berusaha melindungi kakaknya, mantan PM Thaksin Shinawatra dari kasus korupsi. Tewasnya para pendemo ini, menambah belasan korban jiwa lainnya sejak awal November demonstrasi digelar.

Dalam rangka mencegah terjadinya aksi anarkis dari para demonstran, sekitar 14.880 polisi dan tentara dikerahkan di ibukota Thailand pada dua minggu awal pada bulan Januari 2014 untuk mengendalikan massa dan untuk mencegah terjadinya kekerasan atau bentrokan lebih lanjut.⁵⁵ Demonstran kubu oposisi penentang pemerintah terus melancarkan aksinya sampai hari pelaksanaan pemilu 2014 dalam rangka memblokir momentum pemungutan suara, yang dikhawatirkan kubu oposisi hanya akan memperpanjang dominasi politik keluarga Thaksin. Para pengunjuk rasa mengancam menduduki ibukota pada 13 Januari 2014, sampai mereka memenangkan pertempurannya untuk menggulingkan pemerintah dengan menyiapkan *base camp* di sekitar kota, aksi tersebut dilakukan guna mencegah pejabat untuk bekerja dan memotong saluran listrik serta air untuk bangunan negara.⁵⁶ Sehingga aksi massa tersebut telah menjadikan pemerintah kota Bangkok memerintahkan sekitar 146 sekolah ditutup sejak 6 Januari 2014 karena diberlakukannya Bangkok *shutdown*.⁵⁷ Akibat dari lumpuhnya Bangkok ini adalah Saham Thailand dan mata uang baht telah jatuh tajam di tengah kekhawatiran krisis mendalam yang juga berimbas pada ketakutan para wisatawan asing untuk berkunjung ke Thailand.

Situasi Bangkok semakin memanas menyusul kampanye '*shutdown*' telah membuat ibukota Thailand lumpuh, yang dilakukan massa anti-pemerintah.

⁵⁴Anusak Konglang. 28 Desember 2013. *One dead as gunman opens fire at Thai protesters*. Diakses dari: <http://www.thaivisa.com/forum/topic/692397-one-dead-as-gunman-opens-fire-at-thai-protesters/>. (2 Agustus 2014).

⁵⁵Anonim. 8 Januari 2014. *Thailand to deploy 15.000 police, troops for 'shutdown'*. Diakses dari: <http://www.themalaysianinsider.com/world/article/thailand-to-deploy-15000-police-troops-for-shutdown>. (2 Agustus 2014).

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷*Ibid.*

Pemerintah kemudian mengumumkan keadaan darurat untuk menangani segala kerusuhan dan beberapa wabah kekerasan jalanan, di mana terdapat 8 orang termasuk seorang polisi tewas dan ratusan orang terluka. Kekerasan demi kekerasan terjadi, bahkan adanya isu pengincaran tempat tinggal mantan Perdana Menteri Thailand sekaligus pemimpin Partai Demokrat Abhisit Vejjajiva di Sukhumvit Soi 31 melalui sebuah bom pada Rabu 15 Januari 2014.⁵⁸ Di tempat terpisah, dua orang yang merupakan petugas keamanan massa anti-pemerintah, Komite Reformasi Rakyat Demokratik atau People's Democratic Reform Committee (PDRC), juga terluka dalam insiden penembakan di dekat Jembatan Hua Chang di Distrik Ratchathewi. Selain itu, di Nang Loeng, hingga terdapat pula insiden pembakaran sebuah bus yang berasal dari Provinsi Phatthalung.

Krisis politik masa Yingluck yang semakin parah membuka kemungkinan krisis politik Thailand akan berakhir dengan kudeta militer seperti pada krisis-krisis politik pemerintahan sebelumnya. Apalagi Panglima Militer Jenderal Prayuth Chanocha saat akhir Desember 2013 menyatakan bahwa kemungkinan adanya campur tangan militer dalam mengatasi krisis tersebut apabila kalangan elite politik khususnya dari kubu pemerintah dan oposisi tidak cepat mencapai kompromi untuk segera menyelesaikan krisis, misalnya menyelenggarakan pemilu dini, hingga situasi keamanan negara makin tidak terkendali, tidak menutup kemungkinan militer memilih melancarkan kudeta ketimbang membiarkan krisis makin berlarut-larut, meski mungkin opsi politiknya itu harus dibayar dengan kecemasan masyarakat internasional terutama negara-negara Barat yang sangat *concern* dengan demokrasi.

Krisis politik Thailand pada masa Yingluck ini memang tampaknya harus dikaitkan dengan sejarahnya, dimana secara historis, krisis politik Thailand memang seringkali berujung pada kudeta militer. Sejak sistem pemerintahan monarki absolut berakhir tahun 1932, militer Thailand sudah 18 kali melakukan kudeta, 10 kudeta di antaranya berhasil menyingkirkan pemerintahan yang dikup: yaitu kudeta 24 Juni

⁵⁸Anonim. 15 Januari 2014. *Attackers of Abhisit's house arrested*. Diakses dari: <http://englishnews.thaipbs.or.th/attackers-abhisits-house-arrested>. (2 Agustus 2014).

1932 atas PM Raja Rama VII, 20 Juni 1933 atas PM Phya Mano, 9 November 1947 atas PM Pridi Panomyong, 26 September 1957 atas PM Phibul Songgram, 21 Oktober 1958 atas PM Thanom Kittikachorn, 17 November 1971 atas PM Thanom Kittikachorn (lagi), 6 Oktober 1976 atas PM Seni Pramoj, 20 Oktober 1977 atas PM Thanin Kraivichien, 23 Februari 1991 atas PM Chatichai Coonhavan, dan 19 September 2006 atas PM Thaksin Shinawatra.⁵⁹

⁵⁹Adam Taylor dan Anup Kaphle. 22 Mei 2014. *Thailand's army just announced a coup. Here are 11 other Thai coups since 1932*. Diakses dari: <http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/05/20/thailands-army-says-this-definitely-isnt-a-coup-heres-11-times-it-definitely-was/>. (2 Agustus 2015).

BAB III. PELAKSANAAN PEMILU 2 FEBRUARI 2014 DI THAILAND

3.1 SISTEM PEMILU THAILAND

Sejak Pemilu 1933 hingga Pemilu terakhir, perubahan perubahan sistem Pemilu dilakukan pada tiga hal, yaitu:

Metode pemungutan suara, (voting) secara tidak langsung hanya sekali diterapkan pada Pemilu pertama (ke1). Dalam metode ini, pemilih di setiap provinsi memilih wakil pada tingkat subdistrik (tambon), yang lalu memilih seorang anggota dewan dari provinsi itu. Sejak Pemilu kedua dan seterusnya, metode voting diubah menjadi langsung, yaitu pemilih memilih anggota DPR secara langsung;

Penetapan konstituensi, pada Pemilu ke1 diterapkan sistem MMC, Pemilu ke2 hingga ke4 digunakan sistem SMC. Pada Pemilu ke5 hingga ke9, sistem yang diterapkan kembali ke MMC. Sistem MMC kecil digunakan pada Pemilu ke10 hingga terakhir di bawah sistem lama pada 1996 ;

Syarat pencalonan berubah dari waktu ke waktu. Usia minimum seorang kandidat bervariasi antara 20 hingga 30 tahun, sebelum ditetapkan 25 tahun pada pemilu ke10 dibawah konstitusi 1974. Konstitusi ini untuk pertama kalinya juga mewajibkan seorang calon untuk menjadi anggota sebuah partai politik. Konstitusi 1978 (dari Pemilu ke12 hingga ke15) menambahkan bahwa setiap partai politik harus mengajukan sekurangkurangnya setengah jumlah kandidat DPR dari seluruh jumlah kursi DPR. Pada pemilu ke16 (1991) hingga ke19 mengubah syarat ini dengan menetapkan bahwa setiap partai harus mengajukan sekurangkurangnya sepertiga jumlah kandidat untuk seluruh jumlah kursi DPR .

3.2 PEMILU SEBAGAI SOLUSI PENYELESAIAN KRISIS

Perdana Menteri Yingluck Shinawatra kemudian mengambil keputusan untuk menggelar pemilu lebih cepat, yang jatuh pada 2 Februari 2014 sebagai upaya

meredakan ketegangan.⁶⁰ Kebijakan yang dipilih oleh Yingluck dengan melaksanakan Pemilu pada 2 Februari 2014 mendapat penolakan dari pihak oposisi. Pihak oposisi tetap melihat upaya pemerintah untuk melaksanakan pemilu itu bukan menjadi solusi bagi ketegangan politik di Negara itu dan tetap menginginkan agar Yingluck mengundurkan diri dari jabatan PM Thailand. Salah satu petinggi Partai Demokrat Thailand Suthep Thaugsuban menyatakan bahwa “*There is no win-win situation. One side has to win and one side will lose. There is no compromising. We need to get rid of the Thaksin system and reform the country*”.⁶¹ Partai Demokrat Thailand sebagai partai oposisi menyatakan akan memboikot Pemilu 2014. Sebagai partai oposisi, Demokrat mempunyai kekuatan yang cukup besar di parlemen karena jumlah anggota Dewan dari Demokrat jumlahnya banyak. Jadi, dalam kalkulasi politik kelompok oposisi, pihaknya bisa sukses memboikot pemilu Februari 2014.

Sementara itu Pemerintah Thailand tetap menolak seruan untuk menunda pemilu pada Februari di tengah meningkatnya kekerasan. Komisi pemilihan mendesak penundaan pemilihan umum, dengan alasan keamanan untuk para calon yang akan melakukan kampanye. Parlemen kemudian dibubarkan sehingga tidak ada alasan legal untuk penundaan. Sementara Para pengunjuk rasa menuntut pemerintah mundur dan diganti dengan 'dewan rakyat'.

Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra, pada hari Senin (9 Desember 2013) mengumumkan pembubaran parlemen di tengah demonstrasi anti pemerintah yang masih terus berlanjut, bahkan semakin membesar setiap harinya di Negara

⁶⁰Lennox Samuels. 12 September 2013. *Thailand Prime Minister Yingluck Shinawatra Dissolves Parliament, Calls for Elections*. Diakses dari:

<http://www.thedailybeast.com/articles/2013/12/09/thailand-prime-minister-yingluck-shinawatra-dissolves-parliament-calls-for-elections.html>. (2 Agustus 2014)

⁶¹Anuchit Nguyen and Supunnabul Suwannakij. 14 Januari 2014. *Thai Protesters Extend Blockade After Rejecting Poll Talks*. Diakses dari: <http://www.bloomberg.com/news/2014-01-13/thai-protesters-to-extend-blockade-after-rejecting-talks-on-poll.html>. (2 Agustus 2014).

Gajah Putih tersebut.⁶²Sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh Raja Bhumibol Adulyadej menjadwalkan pemilu pada 2 Februari dan Yingluck sebagai perdana menteri interim sampai pemilihan umum diselenggarakan.⁶³Meskipun parlemen sudah dibubarkan, Yingluck Shinawatra masih akan tetap menjabat sebagai perdana menteri sementara, hingga pelaksanaan pemilu di gelar.

Pemerintah Thailand menegaskan pemilihan umum dini akan tetap digelar setelah pihak oposisi sebelumnya menolak tawaran Perdana Menteri Yingluck Shinawatra untuk bertemu membahas penundaan pelaksanaan pemilu dini tersebut. Kelompok oposisi meminta pembentukan Dewan Rakyat yang tidak dipilih sebelum menggelar pemilihan umum. Namun Pemerintah menegaskan tidak ada jalan hukum untuk menunda pemilu dini dengan alasan mengutamakan hak rakyat sebagai hal yang paling penting dilaksanakan. Pemerintah memiliki pandangan bahwa pelaksanaan pemilu akan membawa Thailand pada situasi normal kembali. Partai pemerintah berusaha menjaring banyak dukungan dari pemilih pedesaan dimana di daerah pedesaan itulah mereka memenangkan empat pemilu terakhir.

Perdana Menteri Yingluck Shinawatra menggelar pemilihan umum dini 2 Februari 2014 itu sebagai upaya untuk mengatasi kebuntuan politik di negeri itu. PM Yingluck menegaskan bahwa pemilihan umum ini menjadi pertanda bahwa rakyat menginginkan proses yang demokratis. Partai pimpinannya diperkirakan akan menang kembali namun gugatan hukum oposisi dan tidak tercapainya mayoritas di parlemen kemungkinan tidak akan memecahkan konflik politik selama ini.

Proses dan upaya pelaksanaan pemilu dini yang diwarnai gejolak politik yang dikobarkan para penentang pemerintah yang bernafsu "melumpuhkan Bangkok" dan menumbangkan Perdana Menteri (PM) Yingluck Shinawatra itu berjalan sukses karena mendapatkan persetujuan dari Raja Thailand. Raja Thailand Bhumibol

⁶²Anonim. 9 Desember 2013. *Thailand's prime minister dissolve Parliament, calls elections*. Diakses dari: http://www.cleveland.com/world/index.ssf/2013/12/thailands_prime_minister_disso.html. (2 Agustus 2014).

⁶³*Ibid.*

Adulyadej pada Senin 9 Desember 2013 menyatakan menyetujui pembubaran parlemen dan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) pada 2 Februari 2014.⁶⁴

Sementara itu, anggota senior bekas partai berkuasa Thailand, Pheu Thai, setuju memasukkan nama pelaksana tugas Perdana Menteri Yingluck Shinawatra sebagai kandidat utama untuk pemilihan umum mendatang. Partai pemerintah menyatakan bahwa kesepakatan itu dicapai pada pertemuan partai Senin 9 Desember 2013 setelah Yingluck mengumumkan pembubaran lembaga perwakilan (Parlemen) pada pagi hari untuk kemudian Yingluck akan dipilih untuk mencalonkan diri menjadi perdana menteri lagi karena dia telah menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam masa jabatannya dan telah membuat keputusan demi kepentingan demokrasi dan rakyat.⁶⁵ Pencalonan Yingluck secara resmi disampaikan pada pertemuan partai dua hari setelah itu (11 Desember 2013) dengan menambahkan daftar kandidat partai untuk pemilu.

Mahkamah Agung Thailand memang telah menyarankan penundaan pemilu, namun, pemerintah menganggap pemilu merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan krisis yang telah berlangsung sejak November lalu itu. Mahkamah Konstitusi (MK) Negeri Gajah Putih itu juga memberikan kewenangan bahwa pemilu yang dijadwalkan akan digelar 2 Februari 2014 dapat dijadwalkan ulang, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertemu dengan pemerintah sementara. Meskipun pada akhirnya disepakati pemilu akan dilangsungkan sesuai jadwal semula, meskipun terdapat ketidakpuasan dari pihak KPU.

Pemerintah sementara Thailand pada akhirnya tetap memutuskan menyelenggarakan pemilu pada 2 Februari 2014. Keputusan pemerintah ini didasarkan pada fakta bahwa pemungutan suara awal yang digelar di 66 provinsi baru-baru ini berlangsung tanpa masalah, dan hanya 10 provinsi dan Metropolitan

⁶⁴Antara news. Selasa, 10 Desember 2013. *Raja Thailand setuju pemilu diselenggarakan 2 Februari*. Diakses dari: <http://www.antaraneews.com/berita/408822/raja-thailand-setuju-pemilu-diselenggarakan-2-februari>. (5 Agustus 2014).

⁶⁵Siar Batavia News. 11 Desember 2013. *Raja Thailand Setuju Pemilu 2 Februari*. Diakses dari: <http://siarbatavianews.com/news/view/1195/raja-thailand-setuju-pemilu-2-februari>. (5 Agustus 2014)

Bangkok saja yang bermasalah. Ini argumen PM Yingluck menetapkan pemilu tetap berlangsung 2 Februari, sesuai jadwal awal.⁶⁶ Pemerintah merasa mampu untuk mengatasi semua persoalan menyangkut pemilu dimana penundaan pelaksanaannya tidak akan menjadi solusi untuk menyelesaikan krisis politik yang sudah terjadi berbulan-bulan di Negara itu.

Pemerintah Thailand juga fokus terhadap keamanan ketika pelaksanaan Pemilu berlangsung, mengingat sebelumnya banyak terjadi protes dari pihak oposisi. Dalam rangka mengamankan pelaksanaan pemilu 2 Februari 2014 dari ancaman gangguan keamanan dan boikot oleh kelompok oposisi, Pemerintah Thailand dengan lembaga pertahanan keamanannya berusaha membendung gerakan aksi boikot dan gangguan itu dengan memperketat pengamanan melalui pengerahan 10.000 polisi di berbagai tempat pemungutan suara (TPS) di ibu kota Bangkok pada hari pelaksanaan pemilu hari Minggu 2 Februari 2014.⁶⁷ Demi keamanan negara, pemerintah Thailand menetapkan negara tersebut dalam keadaan darurat sejak 22 Januari 2014.

Departemen Investigasi Khusus (DSI) Thailand juga meminta Pengadilan Pidana untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi 16 pemimpin protes anti-pemerintah, yang dituduh melanggar dekrit keadaan darurat, dengan Suthep, sang pemimpin protes berada di urutan teratas.⁶⁸ Pusat Penjaga Ketentraman dan Ketertiban (CMPO) juga telah memperingatkan 30 perusahaan swasta yang diketahui terlibat memberikan dukungan kepada gerakan untuk berhenti mendukung protes PDRC. Sekretaris CMPO mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang diketahui membantu gerakan anti-pemerintah akan dikenai pasal pelanggaran Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dekrit darurat dan Undang-Undang Anti-Pencucian

⁶⁶ Askan Krisna. 30 Januari 2014. *Pemilu Thailand dalam sorotan*. Diakses dari:

<http://www.antarane.ws.com/berita/416756/pemilu-thailand-dalam-sorotan>. (5 Agustus 2014).

⁶⁷ Ade Hapsari Lestari. 29 Januari 2014. *Thailand Kerahkan 10 ribu Polisi Amankan Pemilu*. Diakses dari: <http://news.okezone.com/read/2014/01/29/411/933518/thailand-kerahkan-10-ribu-polisi-amankan-pemilu>. (5 Agustus 2015).

⁶⁸ Heppy Ratna. 28 Januari 2014. *Thailand Ajukan Surat penangkapan 16 Pemimpin Protes*. Diakses dari: <http://www.antarane.ws.com/berita/416368/thailand-ajukan-surat-penangkapan-16-pemimpin-protes>. (6 Agustus 2014)

Uang dengan hanya untuk menyediakan kendaraan dan dukungan keuangan bagi para demonstran.

Kepolisian Thailand menyiagakan lebih dari 200 ribu polisi untuk mengamankan pemilu tersebut. Asisten Kepala Polisi Thailand Letnan Jenderal Amnart An-artngam mengatakan 200 ribu polisi itu termasuk 1.450 unit gerak cepat dari polisi setempat.⁶⁹ Mereka akan mengamankan 93.535 tempat pemungutan suara di 375 konstituen di 77 Provinsi Thailand.⁷⁰

Sementara itu, pihak Angkatan Bersenjata Thailand menyatakan bahwa posisi mereka semakin tidak nyaman dengan iklim politik dan kekerasan, yang meningkat dalam pemilihan umum dini tersebut. Pihak militer meminta semua unsur untuk menghindari kekerasan pada pemilu 2 Februari 2014. Beberapa saat sebelumnya, militer memang menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melakukan kudeta dalam menghadapi tantangan politik saat itu. Tetapi, pihak militer Thailand agaknya mengajukan usul kepada pemerintah yang intinya semua persoalan politik diselesaikan melalui proses demokrasi.

Sistem pemerintahan suatu Negara yang menggunakan demokrasi menganggap pemilu adalah alat untuk mencapai tujuan demokrasi, tetapi tidak harus menciptakan perpecahan. Pihak militer juga percaya bahwa pintu dialog tidak benar-benar tertutup. Panglima militer Thailand Jenderal Prayuth Chan-ocha berjanji untuk bekerja erat dengan CMPO yang dikelola pemerintah, untuk lebih memperkuat keamanan setelah kematian seorang pemimpin inti protes pada hari pelaksanaan pemilu.⁷¹ Juru bicara Angkatan Bersenjata Winthai Suwari mengatakan bahwa tentara menyatakan keprihatinan atas bentrokan antara para demonstran dan pendukung propemerintah selama pemungutan suara awal pada hari Minggu pelaksanaan pemilu, yang menyebabkan kematian Suthin Tharathin, seorang pemimpin inti protes, dan

⁶⁹ Natalia Santi. 1 Februari 2014. *Mantan PM Thailand Golput*. Diakses dari: <http://www.tempo.co/read/news/2014/02/01/118550115/Mantan-PM-Thailand-Golput>. (7 Agustus 2014)

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.* Askan Krisna.

mencederai 13 orang lainnya.⁷² Bahkan Suthin seorang pemimpin Tentara Rakyat untuk Menggulingkan Rezim Thaksin, ditembak kepalanya di luar TPS di kompleks Kuil Wat Sri-iam di ibu kota Bangkok pada saat pelaksanaan pemilu 2 februari 2014 itu.

3.3 PEMBOIKOTAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMILU DINI 2 FEBRUARI 2014

Keputusan pemerintah membuat kelompok oposisi yang menuntut Yingluck mundur bereaksi keras dan kembali melanjutkan unjuk rasa semakin besar di seluruh negeri Thailand terutama di ibukota Bangkok sampai membuat sebagian pusat ibukota tertutup dan lumpuh. Pemimpin pengunjuk rasa -mantan Wakil PM, Suthep Thaugsuban- sudah menyatakan menolak semua upaya kompromi. Kelompok oposisi bahkan kemudian mengeluarkan ancaman akan memboikot pelaksanaan pemilu 2 Februari 2014 tersebut.

Kelompok oposisi yang dipimpin mantan wakil PM Suthep Thaugsuban, yang juga sekjen Komite Reformasi Demokratik Rakyat (PDRC), pelaksanaan pemilihan umum dini 2 februari 2014 itu karena mereka menuntut agar sistem politik diubah dulu sebelum pemilu digelar, yakni desakan harus dibentuk Dewan Rakyat dahulu. Suthep memiliki pandangan bahwa Dewan Rakyat itu anggotanya terdiri atas berbagai unsur, namun tidak melalui pemilihan, yang tampaknya untuk menghindari kekhawatiran kemenangan dicapai pihak partai berkuasa. Banyak pihak meyakini bahwa partai berkuasa kemungkinan akan menang dan bila jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya besar, maka partai berkuasa mempunyai landasan memegang mandat rakyat meskipun oposisi memboikot pemilihan umum.

Ancaman tersebut terbukti menjadi kenyataan dengan beberapa upaya boikot dan blokade yang dilakukan oleh massa kelompok oposisi di beberapa TPS. Pemilihan umum dini negara Thailand yang berlangsung dan dimulai pada Minggu, 2

⁷²*Ibid.* Askan Krisna.

Februari 2014 pukul 08.00 waktu setempat itu diikuti lebih dari 48 juta pemilik suara di 93.305 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di seluruh Thailand.⁷³ Berbagai masalah meliputi pelaksanaan pemilu itu, dimana pada Sabtu malam menjelang pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terpaksa membatalkan pemilu di semua TPS di distrik Lak Si, Bangkok, menyusul bentrokan antara pro-pemerintah dan para demonstran. Bentrokan ini membuat delapan orang mengalami cedera. Kekhawatiran muncul di sejumlah daerah lainnya di Thailand. Suthep Thaugsuban, pemimpin demonstran, mengklaim akan membuat gerakan boikot pemilu pada hari pelaksanaan pemilu dini itu dengan mengancam melumpuhkan ibu kota Bangkok.

Pelaksanaan Pemilu Thailand 2 Februari 2014 itu terhambat di beberapa tempat dimana massa dari kelompok penentang pemerintah di Bangkok berupaya mencegah penyaluran kotak suara ke TPS. Para penentang pemerintah di Thailand berhasil menghentikan pemungutan suara di beberapa tempat di ibukota Bangkok dan di kawasan selatan negara itu. Pihak berwenang yakni Komisi Pemilihan Umum Thailand mengatakan di sembilan provinsi -yang mayoritas warganya mendukung kubu oposisi- pemungutan suara sama sekali tidak bisa dilaksanakan karena aksi para pengunjuk rasa dari kelompok oposisi. Sementara di pihak lain, pemerintah mengklaim bahwa 89% tempat pemungutan suara beroperasi secara normal dalam pemilihan umum dini yang diboikot partai oposisi utama itu.⁷⁴

Massa dari kelompok oposisi mencoba mengganggu penyaluran surat suara, seperti yang terjadi di ibukota Bangkok dimana sebagian jalan utama di kota itu dijaga oleh kelompok anti-pemerintah dengan memasang penghalang. Pengunjuk rasa antipemerintah di Thailand mulai memblokir berbagai kantor sebagai upaya mengganggu pelaksanaan pemilihan umum itu. Mereka melakukan pengepungan sejumlah kantor di ibukota Bangkok dan juga di Thailand selatan untuk mencegah

⁷³Lasthia Kertopati dan Santi Dewi. 2 Februari 2014. *TPS Diblokir, Jutaan Warga Thailand TAK Dapat Ikut Pemilu*. Diakses dari: <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/478096-tps-diblokir--jutaan-warga-thailand-tak-dapat-ikut-pemilu>. (7 Agustus 2014).

⁷⁴Ahmad Toriq. 3 Februari 2014. *Pemilu di Thailand Diwarnai Unjuk Rasa*. Diakses dari: <http://news.detik.com/read/2014/02/03/012449/2484978/1148/?nd772204topnews>. (7 Agustus 2014)

petugas menyalurkan kertas pemungutan suara ke tempat-tempat pemungutan suara. Kubu pendukung pemerintah antara lain menggelar unjuk rasa di Provinsi Nonthaburi di luar ibukota Bangkok. Mereka menyuarakan aspirasi dengan mengendarai sepeda motor dan meminta kelompok-kelompok penentang untuk menghormati hak pilih mereka. Gelombang unjuk rasa ini telah terjadi selama beberapa bulan terakhir.

Boikot pemilu 2 Februari 2014 itu dibuktikan juga dengan fakta bahwa Mantan Perdana Menteri Thailand sekaligus pemimpin oposisi Partai Demokrat Abhisit Vejjajiva tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum itu meskipun tempat pemungutan suara (TPS) itu terletak dekat kediaman Abhisit di Soi Sukhumvit, Bangkok.⁷⁵ Dalam pesan di laman Facebooknya, Abhisit mengatakan pemilu dini tersebut tidak konstitusional.

Meskipun pemilihan umum dini Thailand itu akhirnya berjalan sesuai jadwal, namun berbagai kekerasan mewarnai pesta demokrasi tersebut. Sejumlah orang, bahkan wartawan, turut menjadi korban dalam bentrokan yang digencarkan pada demonstran. Seorang wartawan asal Amerika, James Nachtwey, harus merelakan kakinya terkena tembakan tapi tidak mengalami luka serius. Pada Sabtu, 1 Februari 2014 kemarin, sejumlah pengunjung rasa anti-pemerintah telah memblokir gedung dan melepaskan tembakan dengan pistol dan senapan hingga membuat sejumlah wartawan dan orang yang lewat melarikan diri untuk berlindung selama baku tembak selama sekitar 30 menit.⁷⁶ Bentrokan ini juga membuat sejumlah demonstran pro-pemerintah menderita cedera lantaran tembakan dari demonstran anti-pemerintahan.

Sementara itu, pemimpin oposisi Thailand juga menjadi korban kekerasan menjelang pelaksanaan pemilu dini tersebut. Salah seorang pemimpin gerakan antipemerintah Thailand, Suthin Taratin, tewas ditembak dalam bentrokan dengan pendukung pemerintah di ibukota, Bangkok. Suthin Taratin sedang menyampaikan pidato dalam unjuk rasa ketika ia terkena tembakan pada Minggu 26 Januari

⁷⁵ *Ibid.* Natalia Santi.

⁷⁶ Aningtias Jatmika. 2 Februari 2014. *Rusuh Pemilu Thailand, Wartawan Jadi Korban*. Diakses dari: <http://www.tempo.co/read/news/2014/02/02/118550279/Rusuh-Pemilu-Thailand-Wartawan-Jadi-Korban?view=fullsite>. (7 Agustus 2014).

2014.⁷⁷ Kekerasan terjadi ketika pengunjung rasa berusaha memblokir akses ke tempat-tempat pemungutan suara (TPS) di Bangkok sebagai upaya untuk menggagalkan warga memberikan suara awal sebelum pemilu dilaksanakan 2 februari 2014.

Chuvit Kamolvisit, pemimpin Partai Rak Thailand, juga mengalami penyerangan oleh seorang pria saat dalam perjalanan untuk memberikan suara di tempat pemungutan suara Unit 84 di Distrik Din Daeng, Bangkok, Ahad, 2 Februari 2014.⁷⁸ Chuvit sedang berjalan ke TPS dari rumahnya di Soi Ratchadapisek 3 ketika seorang pria berpakaian hitam dengan peluit dan mengenakan bendera nasional Thailand menyerangnya dari sisi kiri kepalanya. Pria penyerang, yang diyakini sebagai pengunjung rasa anti-pemerintah, langsung ditangkap oleh pengawal Chuvit. Chuvit menderita cedera kepala dan kemudian dilarikan dengan sepeda motor menuju rumah sakit.

3.4 PEMBATALAN HASIL PEMILU DINI 2 FEBRUARI 2014

Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand pada Jumat 21 Maret 2014 memutuskan bahwa pemilihan umum (pemilu) yang diselenggarakan pada 2 Februari 2014 lalualadalah tidak sah, dan oleh karena itu akan dilakukan Pemilu Thailand yang baru.⁷⁹ Keputusan itu diambil oleh enam dari sembilan hakim MK yang menyatakan bahwa pemilihan yang berlangsung 2 Februari lalu tidak sesuai dengan UU Konstitusi Thailand. Adapun enam hakim yang menyatakan Pemilu Thailand tidak sah saat pembacaan amar putusan antara lain adalah Jaran Pukditanakul, Charoon Intachan, Nurak Marpraneet, Boonsong Kulbupar, Suphot Khaimuk, dan Taweekiat Meenakanit. Sementara tiga hakim yang mendukung Pemilu adalah Chut Chonlavorn, Udomsak Nitimontree, dan Chalermpon Akeuru.

⁷⁷ BBC Indonesia. 26 Januari 2014. *Pemimpin Oposisi Thailand Tewas Ditembak*. Diakses dari: http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/01/140126_thailand_oposisi_tewas. (8 Agustus 2014)

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Alicia Sakina. 21 Maret 2014. *MK Thailand Batalkan Pemilu Februari*. Diakses dari: <http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/asean/14/03/21/n2sb43-mk-thailand-batalkan-pemilu-februari>. (10 Agustus 2014).

Para hakim MK Thailand itu menegaskan alasannya adalah karena pemilihan itu dilakukan tidak serentak diikuti oleh ke-28 daerah pemilihan yang ada.⁸⁰ Tidak hanya itu, massa antipemerintah pun telah menghalang-halangi pendaftaran para kandidat yang akan mencalonkan diri. Atas terjadinya ketidakserentakan tersebut, Konstitusi Thailand menjelaskan, pemilu harus diselenggarakan pada hari yang sama secara nasional. Namun, belum ada respons publik lebih lanjut terkait pemilu baru Thailand itu terutama tanggal pelaksanaannya yang akan ditetapkan pemerintah melalui konsultasi bersama dengan KPU Thailand. Adapun alasan akhirnya MK memutuskan pelaksanaan pemilihan ulang Thailand itu, setelah adanya pula permohonan dari Ombudsman setempat.⁸¹ Ombudsman Thailand menerima keluhan seputar pemilu sejak bulan Februari 2014 yang diprotes publik karena berjalan tidak serentak itu, dari kalangan dosen-dosen universitas.

Di tengah-tengah sudah diputuskannya pemilu Februari lalu yang tidak sah dan waktu tunggu untuk mengetahui kepastian pemilu yang baru, pelaksanaan pemilu kembali itu memiliki dampak yang mungkin saja dapat memperbaiki atau justru memperburuk situasi politik Thailand. Sebelumnya pada pemilihan Februari tersebut, pihak oposisi Partai Demokrat, melakukan pemboikotan dimana kemudian hasil pemilu itu pun tidak diumumkan, karena penghitungan suara tidak pernah selesai.

Setelah keputusan MK yang membatalkan hasil pemilu 2 Februari 2014 tersebut, Partai Demokrat mengancam akan hal yang sama yakni melakukan pemboikotan pada pemilu ulang apabila ternyata Thailand tetap berada di bawah kuasa pemerintahan Yingluck. Tidak hanya itu, jika pemilu ulang nanti berjalan baik, Yingluck tentu akan menghadapi sejumlah masalah dan tantangan hukum yang mampu melengserkan dirinya dari kedudukan saat ini. Catatan hukum yang disiapkan musuh Yingluck pun akan ditujukan pada adik mantan PM Thailand Thaksin Sinawatra itu beserta sekutu politiknya.

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹*Ibid.*

Putusan MK itu semakin menunda pembentukan pemerintahan baru Thailand yang telah dibayangi aksi demonstrasi massa antipemerintah selama berbulan-bulan yang bertujuan menggulingkan Perdana Menteri (PM) Menteri Yingluck Shinawatra. Dampak dari pembatalan pemilu 2 februari 2014 oleh MK Thailand tersebut akan dibahas pada bab selanjutnya.



BAB IV. DAMPAK PEMBATALAN HASIL PEMILU 2 FEBRUARI 2014 TERHADAP PENYELESAIAN KRISIS POLITIK THAILAND

Keputusan PM Yingluck untuk mengambil langkah mengadakan pemilu pada 2 Februari 2014 yang bermaksud memberikan jalan dan solusi tengah bagi para oposisi setelah berbulan-bulan Negara Thailand dalam kondisi tidak menentu yang sangat mengganggu perekonomian Thailand umumnya dan Bangkok khususnya, akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Thailand. Langkah pemerintah untuk melaksanakan pemilu tersebut yang mendapatkan pertentangan dari oposisi dengan melakukan boikot pemilu tersebut yang mengakibatkan Pemilu tidak berjalan dengan baik, berhasil digagalkan oleh kelompok oposisi melalui gugatan pengadilan atas hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi Thailand yang kemudian memutuskan bahwa hasil pemilu 2 Februari 2014 adalah tidak sah secara hukum.

Pembatalan hasil pemilu 2 Februari 2014 tersebut membuat Posisi PM Yingluck kemudian semakin terdesak, terlebih setelah itu Lembaga Peradilan Mahkamah Agung Thailand juga melakukan pemanggilan untuk persidangan terhadap Yingluck atas dugaan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh Yingluck dalam menjalankan kebijakan dan pengajuan RUU.

4.1 DAMPAK KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBATALKAN HASIL PEMILU FEBRUARI 2014 THAILAND

Dalam menganalisa krisis politik yang terjadi di Thailand pada masa Pemerintahan Yingluck Sinawathra, penulis terlebih dahulu melihat krisis legitimasi yang dialami oleh PM Yingluck yang dianggap sudah tidak memiliki legitimasi dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa pada tanggal 8 Desember 2013 ketika demonstrasi dan protes besar-besaran oleh kelompok oposisi pimpinan Mantan PM Abhisit Vejjajiva, anggota parlemen dari partai oposisi ramai-ramai menyatakan mundur dengan alasan bahwa partai pimpinan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, Pheu Thai dan pemerintah tidak pernah bertanggung jawab

setelah meloloskan RUU Amnesti yang kontroversial.⁸²Selain itu langkah pengunduran anggota parlemen dari partai oposisi itu ditempuh dengan tujuan menekankan pada publik Thailand bahwa pemerintahan Yingluck sudah tidak lagi memiliki legitimasi. Seperti yang dinyatakan oleh salah satu anggota parlemen Bangkok, Sansern Samalapa, yang menulis di akun Facebooknya bahwa pengunduran diri massal itu dimaksudkan untuk menolak sistem parlemen rezim Thaksin yang tidak lagi memiliki legitimasi. Sebanyak 152 anggota parlemen dari Partai Demokrat resmi mengundurkan diri dan dengan demikian kelompok oposisi berharap dapat mengembalikan kekuasaan kepada rakyat dan membiarkan Pemerintah Yingluck memutuskan apa yang sebaiknya dilakukan.⁸³

Krisis politik Thailand kemudian mencapai puncaknya dua kali, yakni pada 7 Mei 2014 saat terjadinya kudeta pengadilan oleh MK Thailand atas PM Yingluck Shinawatra, dan pada 22 Mei 2014 saat terjadinya kudeta oleh militer Thailand terhadap pemerintahan sementara oleh wakil PM Niwatthamrong. Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi Thailand beberapa waktu lalu memutuskan pemilihan umum yang digelar pada 2 Februari adalah tidak sah. Selain itu, MK Thailand juga menjatuhkan vonis bersalah atas Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dalam kasus tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan dengan demikian, MK memutuskan bahwa PM Yingluck harus meletakkan jabatannya sebagai PM Thailand pada 7 Mei 2014. Campur tangan pengadilan Thailand ini menguntungkan Partai Demokrat sebagai kelompok oposisi setelah sebelumnya pada bulan Februari, partai itu memboikot penyelenggaraan pemilihan umum setelah sejumlah petingginya memimpin demonstrasi secara masif mendesak pembubaran pemerintah dan membentuk dewan yang terdiri dari para elit pemerintah. Kemudian pada Bulan Maret, Mahkamah Konstitusi tidak mengakui hasil pemilihan umum dengan alasan

⁸² Andrew McGregor Marshall.2014. "A Kingdom In Crisis": Thailand Struggle For Democracy In The Twety First Century. Hal 145

⁸³ Ibid

bahwa pemilu tidak digelar secara serentak di seluruh negeri, meskipun faktanya ini disebabkan oleh boikot dan upaya pihak oposisi yang menghalau pemilihan ulang.

Demokrasi Thailand memang telah mengalami beberapa krisis dengan terjadinya kudeta militer yang membuat supremasi sipil berada dibawah kendali militer sebagai pihak yang mengontrol jalannya negara. Kudeta militer 22 Mei 2014 juga menandai jatuhnya demokrasi Thailand dimana militer Thailand berhasil merebut dan mengambil alih kekuasaan dari Pemerintahan sipil sementara Wakil PM Niwatthamrong yang menggantikan tugas Perdana Menteri Yingluck Shinawarta yang sebelumnya mengalami kudeta yudisial. Rasionalisasi yang digunakan oleh pihak militer adalah bahwa kondisi politik Thailand sudah sangat memprihatinkan dan bisa mengancam keamanan negara jika instabilitas politik dan demonstrasi terjadi terus menerus. Sebagaimana dikatakan oleh Jurgen Habermas, pemerintahan Yingluck yang terus menerus dilanda krisis politik dan konflik dengan kelompok oposisi, membuat pemerintahannya mengalami krisis legitimasi. Krisis dalam suatu negara akan menyebabkan hilangnya legitimasi lembaga pemerintahan.⁸⁴

Konsolidasi demokrasi di Thailand tidak berjalan dengan baik karena campur tangan dan peran Militer yang begitu kuat mengakar dalam Politik negara tersebut. Secara historis, Sejak berakhirnya pemerintahan Monarki absolut pada 1932 menjadi monarki konstitusional, militer mengambil peran yang sangat besar dalam politik Thailand dimana militer tidak hanya mengurus masalah pertahanan, tetapi juga dimensi keamanan nasional lain yakni stabilitas politik melalui kontrol terhadap aparatur negara yang meliputi aparat kepolisian dan pelayanan sipil. Dengan pengaruh besar militer dalam pembuatan kebijakan politik tersebut, perubahan politik dan pelembagaan politik yang demokratis tentunya tidak bisa dijalankan dengan baik oleh kelompok-kelompok sipil atau pun partai politik karena sistem kepartaian di negara Thailand sulit untuk dikatakan institusional.

⁸⁴ Jurgen Habermas. 1975. *Legitimation Crisis*. NewYork. Beacon Press, Hal . 67

Sebagai sebuah negara demokrasi konstitusional, Thailand juga menganut sistem pemerintahan melalui pemilihan lembaga perwakilan dan adanya jaminan kebebasan politik bagi warganya atas dasar supremasi sipil. Namun, terjadinya 14 kali kudeta militer (yaitu tahun 1932, 1933, 1947, 1957, 1958, 1971, 1976, 1977, 1991, 2006, dan 2014) menegaskan bahwa pemerintahan sipil seringkali tidak mampu mengatasi kekerasan politik dan cekcok internal pada diri partai-partai politik.⁸⁵ Inilah yang menyebabkan perampasan kekuasaan yang dilakukan militer untuk mengakhiri sebuah pemerintahan sipil dengan alasan memulihkan stabilitas politik dan keamanan negara. Kondisi lemahnya kekuatan sipil dan sebaliknya begitu kuatnya pengaruh militer ini membuat demokrasi Thailand berada pada situasi yang tidak berkembang. Pola berulangnya kudeta militer yang diikuti oleh pemerintahan sementara dan otoritarian (bahkan hingga tahun 2014) menekankan rapuhnya demokrasi di Thailand. Konsolidasi demokrasi di negara tersebut sulit berkembang maju jika kepercayaan kepada demokrasi dari kelompok elit militer masih sangat lemah. Pemerintahan sipil yang cenderung koruptif dan lemah, kurangnya penghormatan atas penegakan hukum yang berujung pada krisis politik dan keamanan akan selalu memaksa militer Thailand untuk mengambil sikap dengan dalih melindungi negara.

Konsolidasi demokrasi Thailand tidak akan berhasil selama elit politik sipil dan militer serta tentu saja rakyat masih belum bisa bersikap baik terhadap demokrasi di negara itu. Pondasi pemerintahan yang kuat ditandai dengan adanya legitimasi yang kuat dan penghormatan terhadap proses demokratisasi, termasuk penghormatan terhadap konstitusi dan institusi politik. Supremasi sipil atas militer dalam arti adanya pembatasan militer dalam politik Thailand mutlak dilakukan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Robert Dahl bahwa salah satu kondisi dalam konsolidasi demokrasi adalah adanya kontrol atau supremasi sipil atas militer. Apabila kekuatan militer tidak berada dalam pengawasan penuh pejabat-pejabat yang terpilih secara demokratis, maka lembaga-lembaga politik demokratis tidak akan mungkin bisa

⁸⁵ Kevin Hawison. 2002. *Political Change In Thailand*. New York. Routledge. Hal. 1

berkembang dan bertahan lama. Aktor-aktor di dalam militer, harus tunduk terhadap pejabat-pejabat yang terpilih secara demokratis.

Dalam sejarahnya, konsolidasi demokrasi di Thailand dalam hal penguatan kewenangan penuh sipil atas pihak militer sudah seringkali dilakukan, seperti pada Tahun 1992 hingga 2006, peran militer dalam politik telah tereduksi dalam perubahan konstitusi.⁸⁶ Peran militer yang sentral telah bergeser ke arah yang lebih tradisional yakni hanya mengurus pertahanan dan keamanan. Periode tersebut pun dilalui tanpa adanya pemerintahan militer dengan berdasarkan pada Konstitusi Thailand Tahun 1997 yang secara jelas membatasi perwira-perwira aktif militer dalam menduduki posisi pemerintahan atau senat. Namun, konsolidasi demokrasi Thailand tidak disertai dengan komitmen kelompok-kelompok sipil itu sendiri terhadap pilar-pilar demokrasi. Seperti pada masa pemerintahan Thaksin Shinawarta yang dianggap otoriter dimana dominasi kuat Thaksin dalam setiap ruang bisnis dan politik di Thailand, terjadinya krisis ekonomi, kemudian berdampak pada turunnya legitimasi rakyat terhadap pemerintahan Thaksin, terutama oleh kelompok masyarakat kelas menengah. Demikian halnya dengan pemerintahan adik Thaksin, yakni Yingluck Shinawathra yang dianggap koruptif (dengan berusaha menerbitkan RUU Amnesti yang akan melindungi pemulangan Mantan PM Thaksin ke Thailand), juga mengalami krisis ekonomi dan konflik yang tidak terselesaikan dengan oposisi, semakin melemahkan pemerintahan dan otoritas sipil. Dan pada akhirnya, setelah Yingluck mendapatkan kudeta yudisial oleh Mahkamah Konsitusi Thailand yang berujung pada pergantian kendali pemerintahan ke tangan Wakil PM Niwatthamrong, Panglima tertinggi militer, Jendral Prayuth Chan-Ocha akhirnya memutuskan mengambil alih pemerintahan dengan alasan penyelamatan stabilitas negara. Konsolidasi demokrasi di Thailand tidak akan berjalan baik juga karena posisi dan peran Raja Bhumibol Adulyadej yang mendukung tindakan kudeta oleh junta militer.

⁸⁶*Ibid* Hlm. 42

Hal ini membuat militer memiliki dasar yang kuat untuk menerapkan kebijakan militeristik dan pemerintahan otoriter.

Dalam pemikiran konsolidasi demokrasi oleh Larry Diamond, esensi konsolidasi demokrasi adalah terbentuknya suatu perilaku dan sikap tingkat elit maupun massa, atas prinsip-prinsip demokrasi.⁸⁷ Oleh karena itu, konsolidasi demokrasi Thailand mensyaratkan adanya kepercayaan dan komitmen para elit, organisasi politik, militer dan massa terhadap sistem politik (demokrasi) di negara itu dalam tataran norma maupun dalam tataran perilaku. Diamond mengatakan bahwa konsolidasi demokrasi meliputi tiga agenda besar, yakni:

1. Kinerja politik dan ekonomi rezim pemerintah yang berjalan secara demokratis;
2. Institusionalisasi politik (penguatan lembaga birokrasi, partai politik, parlemen, penyelenggaraan pemilu, akuntabilitas pemerintahan, dan penegakan hukum); dan
3. Restrukturisasi hubungan sipil-militer yang menjamin adanya kontrol dan supremasi otoritas sipil atas pihak militer di satu sisi; dan terbentuknya *civil society* yang otonom di pihak lain.

Dengan berdasarkan tiga hal tersebut di atas, sistem demokrasi Thailand membutuhkan pembudayaan demokrasi, institusi negara dan *civil society* yang kuat, serta penghormatan atas aturan main dalam berdemokrasi melalui konstitusi. Budaya politik masyarakat Thailand ini memerlukan perubahan agar konsolidasi demokrasi bisa berkembang maju di negara itu. Sebagaimana dikatakan oleh John F Embree pada Tahun 1950 yang menulis artikel berjudul "Thailand: A loosely Structured Social System" mengenai masyarakat Thailand yang memiliki karakter "loosely structured" yang kurang lebih bisa diartikan sebagai masyarakat yang punya nilai-nilai yang longgar, yakni bertingkah laku individualistik, tidak disiplin, kurang menghormati peraturan, kurang menghormati aturan main yang disepakati, dan

⁸⁷ Larry Diamond. 2006. *Electoral Systems and Democracy*. Baltimore, Maryland. The John Hopkins University. Hlm 224

kurang menekankan akan pentingnya kewajiban dalam keluarga.⁸⁸ Karakter itu juga terbawa dalam berpolitik dan dalam pemerintahan dimana karena terlalu individualistik maka orang Thailand kurang bisa berorganisasi dengan baik dan bekerja dalam kerangka sebuah tim, yang dalam berpolitik masyarakat Thailand mudah mengubah sikap dan teman aliansinya.

4.2 KUDETA MILITER THAILAND 2014

Krisis politik kembali memanas di Thailand setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand pada tanggal 7 Mei 2014 yang melengserkan Yingluck dari jabatan PM Thailand melalui kudeta pengadilan.⁸⁹ PM Yingluck Shinawatra diberhentikan Mahkamah Konstitusi Thailand karena dituduh menyelewengkan kekuasaan dan melakukan penggantian jabatan sekjen Dewan Keamanan Nasional pada 2011. Penggantian posisi penting itu dicurigai sebagai upaya Yingluck untuk memuluskan salah satu kerabatnya, Jenderal Polisi Piewpan Damapong menjadi kepala polisi nasional. Bukan hanya Yingluck, Mahkamah Konstitusi juga mencopot sembilan anggota kabinetnya yang dituduh terlibat dalam penggantian sekjen Dewan Keamanan Nasional. Sebelum Jenderal Prayuth mengambil alih kekuasaan dengan kudeta, Thailand di bawah kendali pemerintahan sementara sehingga dilaksanakan pemilu.⁹⁰

Mahkamah Konstitusi digunakan untuk menyatakan bahwa pemilu Februari tidak sah karena adanya protes-protes keras dari para demonstran Kaos Kuning. Meskipun para demonstran ini jumlahnya semakin berkurang, yang terpusat hanya pada satu titik di Bangkok, namun Yingluck kembali menyerah, dan menyerukan pemilu baru untuk bulan Juli 2014. Tapi kelemahannya mengundang agresi dan Mahkamah Konstitusi kembali menyerang dengan meminta dia untuk mundur sebagai

⁸⁸ John Fee Embre. 1969. *Loosely Structural Social Systems*. Michigan. Yale University. Hlm 25

⁸⁹ DW. 2014. "Kudeta Pengadilan Atas Yingluck" diakses dari <http://www.dw.de/kudeta-pengadilan-atas-yingluck/a-17617133> pada tanggal 3 Agustus 2014.

⁹⁰ BBC Indonesia. 2014. "Kudeta Militer di Thailand" diakses dari http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/05/140522_thailand_darurat pada tanggal 3 Agustus 2014.

Perdana Menteri karena praktek korupsi yang diduga dilakukannya pada tahun 2011.⁹¹ Dengan melengserkan Yingluck bersama dengan sembilan menterinya, pengadilan kembali menggelar kudeta yudisial, meskipun mereka tidak memenuhi tuntutan penuh kaum kaus kuning yang ingin membentuk sebuah dewan yang tidak terpilih, yang ditunjuk untuk memulai pekerjaan pembersihan politik progresif dari Thailand dan melancarkan serangan terhadap kaum tani.

Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra, yang diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi, juga dikenai dakwaan telah melalaikan tugas menyangkut program subsidi beras.⁹² Dakwaan tersebut dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Nasional, Kamis, 8 Mei 2014, sehari setelah Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Yingluck Shinawatra untuk mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri karena menyalahgunakan kekuasaan. Selain Yingluck, sembilan anggota kabinet lainnya juga diberhentikan oleh MK. Seorang anggota Komisi Pemberantasan Korupsi Nasional Vicha Mahakun mengatakan lembaga tersebut dengan suara bulat menyatakan bahwa terdapat cukup bukti untuk mengenakan dakwaan kepada Yingluck. Program subsidi beras merupakan kebijakan penting bagi pemerintahan Yingluck yang membantu menarik jutaan suara petani. Namun program tersebut menimbulkan kerugian negara setidaknya US\$4,4 miliar dan diwarnai dengan berbagai tuduhan korupsi. Pihak pendukung dan penentang pemerintah kemudian melakukan unjuk rasa besar di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua belah pihak yang berujung pada krisis dan kudeta militer di negara tersebut.

Pasca kudeta oleh MK Thailand terhadap Yingluck tersebut, demonstrasi pemrotes penentang pemerintah yang sebelumnya sudah berkurang seolah mendapat momentum lagi dan meletupkan kembali konflik politik berkelanjutan antara

⁹¹ BBC Indonesia. 2014. "*Yingluck Terancam Terjungkal di Pengadilan*" diakses dari <http://www.dw.de/yingluck-terancam-terjungkal-di-pengadilan/a-17443840> pada tanggal 3 Agustus 2014

⁹² BBC. 2014. "*Thai PM Yingluck probed over 'Corrupt Rice Subsidy Scheme'*" diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-asia-25759007> pada tanggal 3 Agustus 2014

kelompok Shinawatra (melalui Partai Phue Thai-nya PM Yingluck Shinawatra) dengan kelompok Suthep Thaugsuban yang didukung Partai Demokrat.

Jika sebelumnya kelompok pro-Shinawatra menguasai pemerintahan, maka keputusan MK itu menyebabkan mereka dalam posisi sama dengan pengritiknya. Dalam situasi itu, kedua kelompok utama itu akan berusaha kuat mencari akses politik untuk menguasai perpolitikan Thailand. Rivalitas konflik antar-kedua kelompok ini terus berlanjut, karena kelompok oposisi, yang terdiri dari lapisan borjuis kecil perkotaan, menuntut agar seluruh pemerintahan disingkirkan dan diganti oleh sebuah badan yang tidak terpilih, dengan kewenangan untuk membersihkan sistem politik dari partai Pheu Thai yang terpilih secara demokratis.

Ketika pihak militer dan raja Thailand berusaha keras untuk netral, keputusan MK itu dianggap lebih menguntungkan kelompok anti Yingluck. Ini berarti bahwa pemilu sebagai mekanisme demokratis bagi pergantian kekuasaan telah 'dibajak' oleh kekuatan yudisial. Fenomena ini memunculkan anggapan kudeta yudisial yang mendasarkan keputusannya kepada Konstitusi buatan militer pada 2006.

Setelah kudeta itu, jabatan PM Thailand dijalankan oleh wakil PM yakni Niwatthamrong Boonsongphaisan yang kemudian harus dikudeta oleh militer meski belum sempat secara efektif menjalankan pemerintahan.⁹³ Militer tampaknya sudah lelah menyaksikan demonstrasi para pendukung kubu Yingluck dan kubu anti-Yingluck yang tidak kunjung selesai.

Militer di Thailand kembali turun tangan dalam krisis politik di negara Thailand sejak Selasa pagi, 20 Mei 2014, pukul 03:00 dini hari yang diumumkan dan disiarkan secara luas melalui stasiun televisi milik militer, Channel 5 bersamaan dengan pemberlakuan keadaan darurat tanpa konsultasi dari pemerintah.⁹⁴ Keadaan darurat tersebut diambil untuk memulihkan perdamaian dan ketertiban di Thailand,

⁹³ BBC Indonesia. 2014. "Thailand Darurat Militer Pemilu" diakses dari http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/05/140520_thailand_darurat_militer_pemilu pada tanggal 3 Agustus 2014

⁹⁴ DW. 2014. *Militer Thailand Ambil Alih Kekuasaan*. Diakses dari <http://www.dw.de/militer-thailand-ambil-alih-kekuasaan/a-17653737> pada tanggal 3 Agustus 2014

sebab selama enam bulan terakhir, Negeri Gajah Putih itu telah digoncang oleh aksi unjuk rasa yang ingin menggulingkan pemerintahan sah. Harian Bangkok Post melaporkan dalam krisis enam bulan tersebut, tercatat 25 orang tewas dan lebih dari 700 orang lainnya terluka.⁹⁵ Berdasarkan UU Darurat Militer tahun 1914, maka konstitusi memberikan kewenangan bagi militer untuk ikut campur selama krisis di negara itu berlangsung.⁹⁶ Menurut pihak militer, mereka menempuh langkah kudeta karena unjuk rasa di antara kedua kubu dapat berdampak kepada keamanan, keselamatan jiwa dan aset publik Thailand. Berdasarkan UU itu maka angkatan bersenjata Thailand dapat dengan leluasa mengendalikan situasi di dalam negeri tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Perdana Menteri.⁹⁷ Selain itu, mereka memiliki beberapa kewenangan antara lain bisa melarang pergerakan massa, dapat mengeluarkan jam malam dan pelarangan untuk mengakses beberapa tempat.

Adanya sensor terhadap media, anggota militer dapat menahan siapa pun yang dianggap melanggar UU hingga tujuh hari ke depan, mereka dapat menggeledah orang, razia bangunan dan memeriksa secara ketat publikasi cetak, dan pengadilan dapat menyidangkan pelaku yang dianggap melanggar UU Darurat Militer paska aturan itu dicabut. Pimpinan militer Jenderal Prayuth mengatakan bahwa darurat militer akan tetap diberlakukan hingga Thailand dianggap aman dan stabilitas di negaranya kembali pulih dan juga meminta kepada warga Thailand untuk beraktivitas seperti biasa.⁹⁸

Panglima militer Thailand, Prayuth Chan-ocha, kemudian mendeklarasikan diri sebagai perdana menteri sementara. Penjelasan atas pengambilalihan jabatan itu sangat klasik karena militer beralasan, Prayuth menjadi perdana menteri untuk kepentingan administrasi hingga rezim pemerintahan kudeta menemukan sosok yang

⁹⁵DW.2014. *Pemilu Thailand ditunda Akibat Bentrok*. Diakses dari <http://www.dw.de/pemilu-thailand-ditunda-akibat-bentrok/a-17637956> pada tanggal 3 Agustus 2014

⁹⁶ Andrew Harding. 2011. *The Constitutional System of Thailand: A Contextual Analysis*. Oxford. North America. Hlm 115

⁹⁷*Ibid*

⁹⁸DW.2014. *Militer Thailand Berlakukan Darurat Perang*. Diakses dari <http://www.dw.de/militer-thailand-berlakukan-darurat-perang/a-17647315> pada tanggal 3 Agustus 2014

sesuai untuk menempati posisi itu. Fungsi administratif Prayuth sebagai perdana menteri tidak terlihat dari kebijakan yang dikeluarkan.

Rezim hasil kudeta itu menerapkan kontrol yang ketat terhadap aktivitas diskursus publik. Stasiun televisi dan radio misalnya, langsung diblokir dan hanya diperbolehkan menyiarkan musik tradisional. Militer memerintahkan media untuk tidak mewawancarai tokoh-tokoh publik seperti mantan pejabat pemerintahan, akademisi, hakim, atau anggota organisasi independen karena hal itu dianggap dapat menciptakan konflik atau kekacauan.

Setelah membekukan stasiun radio dan televisi, junta militer mulai memblokir *facebook*. Jejaring sosial ini diyakini menjadi alat provokasi untuk menentang kudeta militer. *Twitter* dan *Instagram* menyusul. Junta militer benar-benar berusaha menutup seluruh akses yang bisa dimanfaatkan untuk mengganggu langkah pengambilalihan kekuasaan yang dilakukannya. Setelah memberangus seluruh stasiun radio dan televisi, militer memblokir media social dimana *Facebook* mendapat giliran pertama. Kementerian Teknologi Komunikasi dan Informasi Thailand resmi meredam aksi pemrotes melalui *facebook* sejak Rabu 28 Mei 2014.⁹⁹ Wilayah Phuket adalah yang paling merasakan pemblokiran tersebut. Masyarakat Thailand pun ramai menyampaikan kekesalannya melalui *twitter* terkait sulitnya berkomunikasi melalui *Facebook* tersebut. Malangnya, *twitter* dan *instagram* akan mendapat giliran berikutnya untuk diblokir.¹⁰⁰

Sejak kudeta militer dilakukan pada Kamis 22 Mei 2014, gelombang demonstrasi menentang pengambil alihan kekuasaan oleh militer ini terus dilakukan. Militer membekukan stasiun radio dan televisi karena dinilai menjadi akses strategis untuk menentang kudeta. Kini, mereka menilai jejaring sosial menjadi ancaman. Media sosial dinilai menjadi corong massa lainnya untuk memprovokasi gerakan menentang kudeta.

⁹⁹*Ibid*

¹⁰⁰*Ibid*

Selain media sosial, rezim Jenderal Prayuth Chan-Ocha yang bertindak sebagai Perdana Menteri (PM) sementara juga telah membungkam kantor berita asing berpengaruh seperti *CNN* dan *BBC*. Jenderal Prayuth juga berkali-kali mengingatkan warga Thailand agar tidak menggelar aksi demo menentang kudeta dan menegaskan langkah ini sudah mendapat restu Raja Bhumibol Adulyadej.¹⁰¹ Bukan itu saja, Prayuth bahkan mengancam akan menangkap pejabat pemerintah, pengamat politik, dan akademisi yang mengkritisi kudeta militer. Para jurnalis kritis pun siap menghadapi ancaman sama. Langkah militer ini makin mendapatkan kecaman dari dunia internasional. Kudeta militer ini dinilai sebagai langkah melanggar hak asasi manusia yang mencederai demokrasi. Terlebih, kudeta militer diiringi dengan penangkapan sejumlah tokoh politik.

Termasuk, mantan PM Thailand Yingluck Shinawatra. Meskipun telah dibebaskan, Yingluck mengalami berbagai pembatasan.¹⁰² Nasib sama dialami para pengikutnya. Mereka dilarang keluar dari Thailand. Sebanyak 124 politisi Thailand telah dibebaskan. Berdasarkan pengakuan juru bicara militer, dari 253 politisi yang dipanggil 50 tidak memenuhi panggilan. Saat ini, masih ada 76 orang yang ditahan. Dan, dari 76 orang yang masih ditahan, mayoritas adalah pengikut Yingluck. Jenderal Prayuth menegaskan bahwa darurat militer itu bukan sebuah kudeta dan tidak akan membiarkan Thailand terjerembab dalam situasi yang tengah dialami Ukraina atau Mesir.

Tujuan militer memberlakukan keadaan darurat untuk memastikan perdamaian, ketertiban dan keamanan publik bagi semua kelompok dan pihak. Masyarakat Thailand diminta untuk tidak panik dan melakukan semua aktivitas sehari-hari.

¹⁰¹DW. 2014. "Kerajaan Thailand Restui Kudeta Militer" diakses dari <http://www.dw.de/kerajaan-thailand-restui-kudeta-militer/a-17662739> pada tanggal 3 Agustus 2014

¹⁰² Wassana Nanuam. 2014. *Yingluck Goes Home For Barrack* diakses dari <http://www.bangkokpost.com/news/politics/411741/yingluck-goes-home-from-barracks> pada tanggal 3 Agustus 2014

Meskipun pihak militer menegaskan bahwa keadaan darurat itu bukan kudeta, namun suasana berbeda terlihat di beberapa stasiun televisi dimana pasukan militer berjaga di beberapa kantor stasiun televisi dan memerintahkan 10 stasiun televisi satelit, baik yang pro dan anti terhadap pemerintah untuk berhenti siaran. Layar televisi di seluruh wilayah Thailand sempat kosong sementara selama beberapa detik sebelum akhirnya perintah itu disampaikan bersamaan di setiap stasiun televisi. Militer kemudian melarang semua media melaporkan atau menyebarkan berita apapun atau masih mendokumentasikan foto yang merugikan keamanan nasional. Selain memerintahkan untuk menghentikan siaran di stasiun televisi milik pro dan anti pemerintah, tentara juga dikerahkan untuk menjaga gedung-gedung pemerintahan utama di Bangkok. Selama beberapa bulan, gedung tersebut tidak ditempati akibat terjadi demonstrasi oleh massa yang ingin menggulingkan rezim berkuasa karena dituduh melakukan tindak korupsi. Massa anti dan pro pemerintah juga diperintahkan oleh militer untuk tidak melakukan demonstrasi di jalan-jalan demi mencegah terjadinya keributan. Namun, menurut Asisten Perdana Menteri Thailand, langkah yang diambil oleh militer Gajah Putih itu sudah disebut separuh kudeta, karena dilakukan secara sepihak.

Sementara di mata aktivis hak asasi manusia mengkritik langkah berani militer Thailand itu. Menurut perwakilan LSM, Human Rights Watch, Sunai Phasuk, darurat militer justru semakin membawa jauh negara itu dari demokrasi, sebab dengan adanya pemberlakuan darurat militer, maka angkatan bersenjata menuju satu langkah lebih dekat untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan sipil.

Meskipun pada awalnya Pemerintah memberikan tanggapan negatif terhadap tindakan militer untuk melakukan kudeta, namun Perdana Menteri sementara Niwattumrong Boonsongpaisan, akhirnya mendukung keputusan angkatan bersenjata yang mengeluarkan status darurat militer itu. Dalam sebuah pernyataan resmi, Niwatthamrong menyatakan bahwa pemerintah memiliki harapan yang sama dengan militer yakni mengembalikan perdamaian nasional yang bermakna tidak ada tindak kekerasan serta diskriminasi di bawah hukum dan menganggap dengan diberlakukan

darurat militer, maka dapat membantu situasi menjadi kondusif untuk pengajuan tanggal pemilu yang baru pada Agustus 2014 mendatang. Pemerintah, telah mengajukan permintaan tertulis kepada Komisi Pemilihan Thailand tanggal baru untuk menggelar pemilu tanggal 3 Agustus sebagai pengganti pesta demokrasi yang dilakukan tanggal 2 Februari lalu. Pemilu yang digelar Februari itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak sah.

Pertemuan antara kubu pemerintah dan kelompok oposisi kemudian digelar atas inisiatif Jenderal Prayuth dan mengundang beberapa pihak yang berseteru dalam politik Negeri Gajah Putih.¹⁰³ Beberapa pihak yang diundang antara Ketua Front Kesatuan untuk Demokrasi Melawan Diktator (UDD), Jatuporn Prompan, pemimpin Partai berkuasa, Pheu Thai, Jarupong Ruangsuwan, pemimpin Partai Demokrat, Abhisit Vejjajiva, ketua Komisi Pemilihan Umum (EC), Supachai Somcharoen dan Ketua DPR sementara, Surachai Liangboonlertchai.

Namun, pertemuan selama dua jam itu belum mencapai kesepakatan apapun. Pertemuan lanjutan kemudian dilaksanakan pada Kamis pukul 14:00 waktu setempat. Menurut juru bicara militer, Sirichan Ngathong, ada sekitar 40 orang yang hadir dalam pembicaraan hari itu dan setuju untuk mempertimbangkan saran dari kelompok lainnya untuk mencari solusi bersama bagi negara Thailand. Pertemuan tokoh politik di Thailand dalam rangka membahas krisis dilakukan pada tanggal 21 Mei 2014. Kepala Staf Angkatan Darat Thailand mengadakan pembicaraan dengan pemain-pemain inti krisis politik, satu hari setelah mengumumkan berlakunya darurat militer di negara itu. Jenderal Prayuth Chan-Ocha telah meminta untuk bertemu dengan pemerintah, ketua Senat dan dua faksi utama protes.

Pemerintah Militer Thailand mengonfirmasi bahwa eks Perdana Menteri (PM) Yingluck Shinawtra tidak menjadi tahanan rumah. Dugaan Yingluck dijadikan tahanan rumah muncul setelah adik dari Thaksin ini beberapa hari belakangan tidak

¹⁰³DW. 2014. *Militer Thailand Pertemuan Oposisi dengan Pemerintah* diakses dari <http://www.dw.de/militer-thailand-pertemuan-oposisi-dan-pemerintah/a-17650266> pada tanggal 3 Agustus 2014

muncul di publik setelah terjadinya kudeta. Mantan PM Yingluck yang ditahan saat hari pertama kudeta dilaksanakan pun akhirnya dibebaskan oleh Militer. Namun, pihak militer menegaskan bahwa Yingluck berkewajiban melapor pihak militer jika bepergian ke seluruh Thailand dan tidak diizinkan bepergian ke luar negeri. Keterangan status Mantan PM Yingluck tersebut disampaikan oleh The National Council for Peace and Order (NCPO).¹⁰⁴

Pemimpin kudeta militer Thailand menerima penunjukan resmi dari kerajaan untuk menjalankan pemerintahan dalam upacara di ibukota Bangkok setelah mengambil alih kekuasaan dalam kudeta. Penunjukan Panglima Angkatan Darat Prayuth Chan-ocha dilakukan di markas Angkatan Darat, namun Raja Bhumibol Adulyadej yang telah berusia 86 Tahun, tidak menghadiri upacara tersebut. Dengan adanya dukungan dari Raja untuk kepemimpinan Jendral Prayuth Chan-ocha, massa yang tetap melakukan protes melawan kudeta bisa dianggap melawan keputusan Raja. Pihak militer semakin dihadapi oleh pilihan yang sulit: membubarkan massa secara paksa yang risikonya jatuhnya korban, atau tetap menahan diri yang beresiko membuat massa semakin berani menentang.

4.3 INTERVENSI MILITER DALAM POLITIK THAILAND

Selama 70 tahun terakhir, perjuangan antara laki-laki berseragam dan pemerintah sipil dalam politik Thailand telah tercermin dalam sering kudeta dan kontrol militer kekuasaan negara. Militer Thailand telah mendefinisikan dirinya sebagai lembaga terbaik terorganisir dan paling disiplin sejak 1932.¹⁰⁵ Ide militer sebagai 'tulang punggung negara' masih tetap kuat.¹⁰⁶ Di bawah konsep hormat, rasa hormat dan loyalitas kepada atasan, militer telah berusaha untuk menyesuaikan

¹⁰⁴ Bangkok Post. 2014. *Former PM Yingluck Obeys Summons Reports to Junta General* diakses dari <http://www.bangkokpost.com/news/politics/411386/former-pm-yingluck-obeys-summons-reports-to-junta-generals> pada tanggal 3 Agustus 2014

¹⁰⁵ Isarabhakdi, V. (1990) *The Man in Khaki-Debaser or Developer? : The Thai military in politics, with particular reference to the 1976-1986 period*, PhD thesis (Tufts University), Michigan: A Bell & Howell Company. Hal. 13

¹⁰⁶ Phongpaichit, P. and Baker, C. (1997) *Thailand economy and politics*, New York: Oxford University Press. Hal. 326

struktur hirarkis ke dalam kerangka politik Thailand.¹⁰⁷ Akibatnya, tingkat tinggi pengaruh militer dalam politik telah dikurangi terhadap berbunga penuh demokrasi Thailand.

Tempat militer profesional Thailand dalam sebuah pemerintahan yang demokratis menimbulkan banyak pertanyaan. Yang paling penting, seberapa baik dapat kesepakatan militer dengan masalah yang berkaitan dengan kohesi sosial ketika campur tangan dalam politik.¹⁰⁸ Menyatakan bahwa demokrasi terkonsolidasi Thailand telah dipengaruhi oleh peran militer. Militer pasti berpikir itu memiliki hak untuk campur tangan dalam politik untuk membela negara. Ketika militer mengejar peran konon dari melawan ancaman terhadap keamanan negara, bagaimanapun, mencapai kekuatan ekonomi dan politik, sementara pada saat yang sama sehingga menimbulkan faktor yang menimbulkan ketidakstabilan politik dan kekacauan sosial (64).¹⁰⁹ Untuk alasan ini patut dipertanyakan apakah masyarakat Thailand setuju untuk militer memainkan peran dalam politik sebagai militer profesional dengan pengaruh politik yang cukup besar.

Kedua tokoh Asia dan Barat memberikan pemahaman khas dari peran militer dalam negara demokratis dan pemahaman militer dari berbagai lembaga profesional. Bagaimana militer menyeimbangkan tuntutan menjadi militer profesional dan juga terlibat dalam urusan politik? Di Asia, militer lebih mungkin untuk terlibat dalam politik daripada di Barat karena militer Asia mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan politik menjadi bagian penting dan sah kepentingan mereka.¹¹⁰ Di sisi lain, militer Barat berpikir tentang melayani negara sebagai lembaga profesional daripada terlibat dalam politik. Huntington juga berpendapat militer adalah alat pemerintah untuk memerintah negara, dan sebagai hasilnya itu harus tinggal di barak

¹⁰⁷ Royal Thai Army (2009) '*Udomkan Kum-Lung-Pol Khong- Tub Bok (The ideology of Thai Army)*', at <http://www.rta.mi.th/data/article/thai_02.pdf> (accessed on 30 August 2009)

¹⁰⁸ Beeson, M. and Bellamy, A. J. (2008) *Securing Southeast Asia: The politics of security sector reform*, New York: Routledge. Hal. 8

¹⁰⁹ Hirschfeld, J. (1994) 'Thai politics', *Culture Mandala*, 1 (1): Hal. 63-8.

¹¹⁰ Hoadley, J. S. (1975) *Soldiers and Politics in Southeast Asia: Civil-Military Relations in Comparative Perspective*, Cambridge: Schenkman Publishing. Hlm.153

kecuali diminta lain oleh otoritas sipil.¹¹¹ Menurut sudut pandang ini, militer profesional biasanya terus keluar dari politik, hanya memiliki misi eksternal.¹¹²

Dengan demikian, seperti yang dapat dilihat dari kasus militer Thailand, militer Asia memainkan peran politik yang lebih kompleks dan beragam daripada rekan-rekan Barat mereka. Dalam rangka untuk menggambarkan peran militer dalam politik Thailand, penting untuk memahami bagaimana militer Thailand mempertahankan profesionalisme sementara intervensi dalam politik. Di Thailand, militer membenarkan dirinya sebagai lembaga profesional yang bertanggung jawab untuk melindungi negara dengan mengintervensi dalam politik ketika dianggap perlu ini.¹¹³ Namun demikian, pembenaran ini tidak menunjukkan bahwa militer Thailand memiliki tujuan yang benar-benar tertarik dan profesional dalam menjalankan peran ini. Sampai saat ini, keterlibatan militer dalam politik Thailand telah terus-menerus. Militer cenderung untuk mempertahankan tingkat tinggi pengaruh dalam urusan politik dan ekonomi karena mengejar kepentingannya sendiri daripada orang-orang dari masyarakat umum.¹¹⁴

Selain itu, intervensi militer menjadi penghalang normatif demokrasi yang stabil.¹¹⁵ Bunbongkan menyatakan bahwa pemisahan antara demokrasi dan pemerintahan militer masih rentan dalam politik Thailand, dan perkembangan demokrasi telah terbelakang karena pengaruh militer atas proses politik.¹¹⁶ Pada tahun 1991, meskipun militer Thailand mendominasi politik sesuai dengan keyakinan peran

¹¹¹ Huntington, S. P. (1956) 'Civilian control of the military: A theoretical statement', in H. Eulau, S. J. Eldersveld and M. Janowitz (eds), *Political Behaviour: A reader in theory and research*, Free Press, Illinois. Hal. 383

¹¹² Huntington, S.P. (1995) 'Reforming civil-military relations', *Journal of Democracy*, 6 (4): 9-17. Hal. 16

¹¹³ Royal Thai Army (2009) '*Udomkan Kum-Lung-Pol Khong- Tub Bok* (The ideology of Thai Army)', at <http://www.rta.mi.th/data/article/thai_02.pdf> (accessed on 30 August 2009)

¹¹⁴ Beeson, M, Bellamy, A.J. and Hughes, B. (2006) 'Taming the tigers? Reforming the security sector in Southeast Asia', *The Pacific Review*, 19 (4): 72-449. Hal. 453

¹¹⁵ Huntington, S.P. (1995) 'Reforming civil-military relations', *Journal of Democracy*, 6 (4): 9-17. Hal. 15

¹¹⁶ Bunbongkan, S. (2004) 'The military and democracy in Thailand', in R.J. May and S. Viberto (eds.), *The Military and Democracy in Asia and Pacific*, Canberra: The Australian National University Press. Hal. 48

profesional sendiri, itu diabaikan aturan demokrasi. Pada akhir 2006, militer kembali disebut dirinya sebagai lembaga profesional untuk menggulingkan pemerintahan sipil melalui kudeta, namun demokrasi Thailand tidak akhirnya diperkuat dengan intervensi ini.¹¹⁷ Akibatnya, militer Thailand dapat secara akurat digambarkan sebagai lembaga profesional tertarik sementara pada saat yang sama yang terlibat langsung dalam proses politik.

MOTIF INTERVENSI MILITER DI POLITIK THAILAND

Dasar untuk keterlibatan militer dalam politik Thailand pada tahun 1991 dan 2006 akibat identifikasi diri militer dari dirinya sebagai penjaga negara, serta gagasan melestarikan perusahaan kepentingan angkatan bersenjata. Alasan utama, dimana militer Thailand telah terus-menerus mempertahankan kebijakan intervensi di pemerintahan negeri selama beberapa dekade, adalah keyakinan dalam sentralitas institusi yang kuat sendiri untuk melindungi negara dari ketidakamanan.¹¹⁸ Jika militer memiliki motif kuat untuk membela kepentingan bangsa sendiri atau yang anggap berada di bawah ancaman, maka intervensi mungkin terjadi.¹¹⁹ Mengikuti prinsip ini, motivasi untuk meluncurkan kudeta pada tahun 1991 dan 2006 dapat dijelaskan oleh empat variabel yaitu: 1) ideologi militer; 2) kepribadian pemimpin militer; 3) kinerja pemerintahan sipil; dan 4) persetujuan publik dalam kekuasaan militer.

Ideologi militer

Ideologi intervensi adalah fondasi penting dari setiap keputusan oleh militer untuk merebut kekuasaan. Militer Thailand memiliki ideologi militer yang kuat yang pada dasarnya menuntun tindakannya. Rasa tugas terdiri dari loyalitas monarki, layanan kurban kepada negara, perlindungan dan promosi demokrasi dan pertahanan

¹¹⁷ Crispin, W. S. (2009) 'Seeing red in Thailand', *Asia Times*, at <www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/KD04Ae01.html> (accessed on 19 May 2009)

¹¹⁸ Hoadley, J. S. (1975) *Soldiers and Politics in Southeast Asia: Civil-Military Relations in Comparative Perspective*, Cambridge: Schenkman Publishing. Hal. 2

¹¹⁹ Nordlinger, A. E. (1977) *Soldiers in Politics: Military coups and governments*, New Jersey: Prentice-Hall. Hal. 49

kehormatan dan prestise dari institusi militer itu sendiri.¹²⁰Selain itu, dalam menanggapi krisis potensi revolusi, perlindungan kepentingan militer penting sebagai motivasi untuk intervensi militer dalam politik. Militer juga perlu untuk melestarikan kekuasaannya sebanyak mungkin untuk melaksanakan peran yang unik untuk memecahkan krisis melalui intervensi.

Kepribadian pemimpin militer

Kinerja pemimpin militer adalah panduan untuk pengembangan kebijakan militer yang berhubungan dengan perpanjangan atau penurunan kekuatan militer dalam politik. Para pemimpin kudeta Thailand juga adalah pemain penting yang mempengaruhi keberhasilan potensial atau kegagalan kudeta.¹²¹Selain itu, ketika melakukan kudeta, kepemimpinan pribadi jenderal dapat meningkatkan kemungkinan intervensi militer berdasarkan karakter, keterampilan, latar belakang dan pengalaman dalam institusi militer.¹²²Jika beberapa pemimpin militer memiliki kepribadian power-driven kuat, keterlibatan dalam politik mungkin timbul.¹²³

Kinerja pemerintah sipil

Sikap militer untuk campur tangan dalam politik berkaitan dengan perilaku pemerintah sipil dalam menjaga negara. Jika pelanggaran pemerintahan sipil itu kekuasaan yang mengarah ke penghancuran pemerintahan, motivasi militer untuk campur tangan dalam politik semakin menguat.¹²⁴Investigasi 1991 dan 2006 kudeta mengungkapkan alasan utama untuk intervensi militer dalam politik pada kedua kesempatan itu kinerja lemah dan korupsi pemerintah. Hal ini menyebabkan intervensi

¹²⁰ Royal Thai Army (2009) '*Udomkan Kum-Lung-Pol Khong- Tub Bok* (The ideology of Thai Army)', at <http://www.rta.mi.th/data/article/thai_02.pdf> di akses pada tanggal 10 Maret 2015

¹²¹ Sutter, D. (2000) 'A game-theoretic model of the coup d'état', *Economics and Politics*, 12 (2): 23-207. Hal. 207

¹²² Pheng, L. S. and Chuvesiriporn, C.(1997) 'Ancient Thai battlefield strategic principles: lessons for leadership qualities in construction project management', *Project Management*, 15 (3): 133-140. Hal. 139

¹²³ Welch, C.E. and Smith, A. K. (1974) *Military Role and Rule: Prospective on civil-military relations*, Massachusetts: Duxbury Press. Hal. 38

¹²⁴ Nordlinger, A. E. (1977) *Soldiers in Politics: Military coups and governments*, New Jersey: Prentice-Hall. Hal. 53

militer karena keyakinan militer dalam perannya membutuhkan penghapusan dari 'musuh negara'.¹²⁵

Persetujuan publik dalam intervensi militer

Masyarakat umumnya keinginan untuk memiliki kepemimpinan yang kuat apakah pemerintah sipil atau militer untuk secara efektif mengelola kekuasaan negara atas kedua isu-isu politik dan ekonomi.¹²⁶ Di Thailand, fitur dari sistem politik yang lemah yang melekat dalam gaya Thailand demokrasi termasuk rendahnya tingkat budaya politik, birokrasi yang tidak memuaskan dan anggota parlemen terpilih tidak efektif, yang semuanya mempengaruhi persepsi publik pemerintah yang mencakup kurangnya kepercayaan dalam pemerintahan sipil untuk mengatur negara.¹²⁷ Jika elit pemerintah kekurangan tenaga listrik yang cukup atau ternyata tidak dapat secara memadai melayani negara, intervensi militer dalam politik akan termotivasi oleh kecenderungan masyarakat untuk menerima kekuatan militer karena kepercayaan dalam efektivitas elit militer yang kuat untuk memperbaiki keadaan.¹²⁸

IMPLIKASI DARI KUDETA POLITIK THAILAND

Sejak 1990-an, militer telah terus-menerus terlibat dalam politik melalui intervensi militer 1991 dan 2006 dengan tujuan melindungi institusi militer, serta menjaga kepentingan negara. Kedua intervensi termotivasi oleh keinginan militer untuk pengaruh politik sebelum atau setelah kudeta terjadi. Tingkat pengaruh politik oleh militer berimplikasi pada pembentukan demokrasi yang stabil dalam pemerintahan Thailand.

¹²⁵ Pongsudhirak, T. (2008) 'Thailand since the coup', *Journal of Democracy*, 19 (4): Hal. 141

¹²⁶ Isarabhakdi, V. (1990) *The Man in Khaki-Debaser or Developer? : The Thai military in politics, with particular reference to the 1976-1986 period*, PhD thesis (Tufts University), Michigan: A Bell & Howell Company. Hal. 473

¹²⁷ Bunbongkan, S. (1987) *The Military in Thai Politics 1981-86*, Singapore: Institution of Southeast Asia Studies. Hal 84

¹²⁸ Girling, J. (1996) *Interpreting Development: Capitalism, Democracy, and the Middle Class in Thailand*, Southeast Asia Program, Cornell University. Hal 27-28

Dari perspektif teoritis, pertanyaan kita telah meminta mengapa militer telah memiliki pengaruh yang terus-menerus pada politik Thailand sejak tahun 1990-an? Menjawab pertanyaan mengarah pada kesimpulan bahwa ketidakstabilan sistem demokrasi Thailand mengarahkan demokrasi yang lemah. Alasan utama untuk hasil sistem demokrasi yang tidak stabil dari perebutan kekuasaan dalam elit Thailand untuk mengatur negara, korupsi besar dalam pemerintahan sipil dan kurangnya saluran untuk berpartisipasi dalam politik, yang semuanya telah berdampak pada keputusan militer untuk campur tangan dalam politik. Ketika negara adalah sangat besar tidak stabil militer memandang bahwa ia memiliki peran intervensi dalam politik untuk menjaga negara terhadap bahaya.

Sebagai solusi yang memuaskan untuk mengakhiri krisis politik akan sulit untuk menyatakan bahwa intervensi militer adalah jawaban yang baik untuk membangun kembali stabilitas pemerintahan yang demokratis Thailand. Demokrasi elektoral penuh bahkan tidak diatur oleh kudeta sebelumnya.¹²⁹ Namun, pemerintahan militer tidak lagi kompatibel dengan berkelanjutan dan berkembang dukungan untuk demokrasi karena kelanjutan dari pemerintahan yang tidak efektif di bawah kekuasaan militer. Ada beberapa tokoh Connors dan Hewison yang menyatakan bahwa kudeta bukanlah solusi terbaik untuk ketidakstabilan politik di Thailand karena kudeta tidak berhasil menginstal demokrasi yang stabil dan kohesi sosial dalam jangka panjang.¹³⁰

Hal ini jelas bahwa demokrasi Thailand belum membaik pasca-militer aturan karena pemerintah terlalu rapuh dan tidak efektif untuk meningkatkan demokrasi yang stabil seperti yang terlihat pada penurunan dalam menjaga integritas administrasi terutama ketidakmampuan dalam memecahkan sistem patronase besar, kebijakan ekonomi tidak efektif dan uang politik dari tahun 1990-an ke waktu

¹²⁹ Albritton, R. B. and Bureekul, T. (2004) 'Developing democracy under a new constitution in Thailand', Working Paper Series no.28, Taipei: Asian Barometer, National Taiwan University. Hal. 5

¹³⁰ Connors M.K. and Hewison, K. (2008) 'Introduction: Thailand and the "good coup"', *Journal of Contemporary Asia*, 38 (1): 1 – 10. Hal. 3

sekarang .¹³¹ Dalam politik Thailand kontemporer, sering mengalami perubahan dalam prioritas kebijakan politik dan ekonomi telah berdampak pada keberhasilan pemulihan demokrasi konsolidasi.

Baru-baru ini, politik Thailand berada di bawah stres pasca intervensi militer pada tahun 2006. Tidak hanya perang kelas sosial antara masyarakat miskin dan kaya, tetapi juga konflik antara beragam politik cita-cita konservatisme dan liberalisme telah bergerak untuk membangun ketidakpuasan sosial di antara warga Thailand. Setiap kontribusi terhadap stabilitas sosial juga tampak sulit untuk mempromosikan karena dinamika anti dan pro pasukan Thaksin telah menyebabkan perpecahan yang mendalam dalam masyarakat Thailand. Ketegangan konflik sosial antara kelompok anti dan pro-Thaksin telah terpecah bangsa melalui perbedaan ideologi politik yang bertujuan baik melestarikan rezim sebelumnya, yaitu monarki konstitusional atau, di sisi lain, yang bertujuan untuk mendirikan sebuah rezim baru - " negara Thailand yang baru " dengan tujuan untuk membantu Thaksin kembali ke kekuasaan politik.¹³² Namun, dapat dikatakan bahwa "negara Thailand yang baru" tidak mungkin untuk membawa demokrasi konsolidasi karena terus kebijakan populis, promosi kapitalisme, serta menata ulang birokrasi pemerintah, yang semuanya berhubungan dengan revolusi politik yang bertujuan untuk menghancurkan demokrasi Thailand lagi. Sebuah perjuangan atas cara yang paling efektif untuk meningkatkan demokrasi Thailand muncul.

Menurut Thaksin basis dukungan besar yang menamakan dirinya kelompok UDD "Kaus Merah", tujuan utama adalah untuk memberikan kontribusi terhadap demokrasi dengan menentang pemerintahan birokrasi atau otoritarianisme. Konsep ini digunakan untuk mendesak massa rakyat untuk mendukung gerakan gairah mereka. Namun demikian, selama protes, UDD belum memberikan kebijakan

¹³¹ Crispin, W. S. (2009) 'Seeing red in Thailand', *Asia Times*, at <www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/KD04Ae01.html> di akses pada tanggal 10 Maret 2015

¹³² AFP (2010) 'Thai PM rejects protesters demand amid march on barracks', at <<http://www.theage.com.au/world/thai-pm-rejects-protesters-demand-amid-march-on-barracks-20100315-q7n8.html?autostart=1>> di akses pada tanggal 10 Maret 2015

demokratis rinci yang akan memecahkan masalah politik melalui cara-cara politik. Hanya penggunaan kekuatan ditekankan karena mereka ingin mengadopsi taktik yang akan berhasil memaksa pemerintah untuk membubarkan parlemen.¹³³ Pendekatan yang tidak dapat diterima ini memperburuk perpecahan besar dalam masyarakat, yang mengarah ke pembakaran turun dari pusat kota Bangkok. Posting insiden 19 Mei, pemerintah tidak menjamin bahwa semua daerah aman karena banyak kota termasuk Bangkok telah dikontrol ketat terutama untuk mencegah kebakaran disengaja melanggar atau bahaya lain untuk orang-orang di malam hari. Bahkan melalui pemerintah Abhisit telah dikenakan " Jalan peta untuk rekonsiliasi "untuk membangun kesepakatan baru dengan masyarakat dalam pengertian kepastian nasional.¹³⁴ Hal ini menjadi tugas yang menantang bagi pemerintah untuk menanganinya.

Tidak hanya pemerintah tetapi juga militer menjadi faktor yang signifikan dalam situasi politik Thailand saat ini lagi terutama pasca kudeta tahun 2006. Meskipun setelah insiden Mei 1992, peran militer diubah mengikuti profesionalisme militer, tanpa perlu campur tangan dalam politik. Saat ini militer telah mempertahankan perannya menjaga keamanan negara. Misalnya, militer membubarkan demonstrasi UDD selama Songkran (Tahun Baru Thailand) kerusuhan April 2009 dan April 2010.¹³⁵ Sebagai hubungan sipil-militer seluruhnya telah mempertahankan pemerintah yang aman bagi negara. Namun, setelah campur tangan militer dalam politik, ada pandangan umum bahwa militer lebih efektif dalam mengendalikan krisis politik, daripada pemerintah, yang belum memadai

¹³³ *Bangkokpost* (2010) 'Multi-colour group gather to support govt, troops', at <<http://www.bangkokpost.com/news/local/174886/multi-colour-group-gather-to-support-govt-troops>> di akses pada tanggal 10 Maret 2015

¹³⁴ Keyes, C. (2010) 'Dealing with 'the devil', the reds and looking within, at <<http://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/37712/dealing-with-the-devil-the-reds-and-looking-within>> di akses pada tanggal 10 Maret 2015

¹³⁵ Keyes, C. (2010) 'Dealing with 'the devil', the reds and looking within, at <<http://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/37712/dealing-with-the-devil-the-reds-and-looking-within>> di akses pada tanggal 10 Maret 2015

mempertahankan "aturan hukum" untuk cepat menangani kekacauan politik di Thailand.¹³⁶

Mengenai operasi terhadap demonstrasi UDD dengan mengadopsi penggunaan diukur dari kekuatan kekerasan, militer berusaha untuk melakukan perannya sebagai pelindung negara mengendalikan situasi damai Mei 2010, tapi ada skeptisisme tentang kemampuan militer untuk memecahkan krisis. Kesadaran menjadi "tentara semangka" - mengenakan seragam khaki di luar tetapi menjadi merah di bagian dalam mendukung Thaksin muncul dalam kesadaran publik.¹³⁷ Menjaga peran mereka sebagai tentara profesional dengan menghindari keterlibatan dalam politik sehingga menjadi suatu usaha yang sulit bagi militer dihadapkan pada dilema baik menjaga keamanan negara atau melestarikan profesionalisme institusi militer. Singkatnya, pasca 1992, kekuatan politik yang paling telah diselenggarakan oleh pemerintah sipil dalam urusan negara operasi. Namun pasca-2006, militer telah meningkatkan pengaruh di pemerintahan Thailand untuk melindungi negara dari kekacauan, serta memulihkan demokrasi dan memberikan kontribusi untuk kepastian sosial.

Hubungan sipil dan militer di Thailand memang selalu diwarnai pasang surut dan kudeta telah berurat berakar dalam sistem politik negeri gajah putih ini. Sejak tahun 1932 hingga 2006 saja telah terjadi 23 kudeta militer dan 18 kali perubahan konstitusi.¹³⁸ Suchit Bunbongkarn bahkan menyebut kudeta telah menjadi norma bagi perubahan kepemimpinan politik dan pemerintahan di Thailand di mana sejak 1932 perubahan politik terjadi dalam sebuah *cyclical patern*. Faktanya selama ini memang selalu menunjukkan demikian. Kudeta tahun 2006 diikuti dengan pemilihan umum

¹³⁶ Connors, M. K. (1999) 'Political reform and the state in Thailand', *Journal of contemporary Asia*, 29 (2): 202-206. Hal. 206

¹³⁷ Horn, R. (2010) 'Does Thailand's Military Answer to the Government?', at <<http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1978994,00.html>> di akses pada tanggal 10 Maret 2015

¹³⁸ Giles Ji Ungpakorn. 2007. *A Coup For The Rich: Thailand Political Crisis*. Bangkok. Workers Democracy Publishers. Hlm 7S

tahun 2007 dan munculnya periode pendek pemerintahan di bawah sipil.¹³⁹ Kudeta tahun 2006 menjadi pintu bagi militer untuk terlibat dalam situasi politik dan tidak melakukan apa-apa bagi transformasi politik di Thailand. Thailand hingga kini masih dalam situasi demokrasi yang tidak menentu.¹⁴⁰

Jika kita melihat perkembangan hingga saat ini, demokrasi di Thailand masih diwarnai dengan adanya supremasi militer dan kuatnya monarki. Ketiadaan musuh bersama dari luar selama beberapa dekade, nampaknya mendorong militer Thailand ingin masuk ke dalam kancah politik domestik. Hal ini ditambah dengan kondisi rapuhnya pemerintahan demokratis di bawah sipil. Kudeta militer tahun 2006 yang berujung pada intervensi militer dalam dunia politik menjadi pangkal instabilitas Thailand hingga saat ini.¹⁴¹ Meskipun bukan menjadi faktor tunggal, namun intervensi militer ini berdampak pada beberapa hal. Pertama, semakin meruncingnya friksi sosial-politik antara dua faksi utama dalam politik Thailand, yaitu masyarakat pedesaan yang pro Thaksin dan elite Bangkok yang terdiri dari militer, pihak kerajaan (monarki), dan birokrasi (ketiganya disebut *holy trinity* oleh Pavin Chachavalpongpun). Militer jelas berada di belakang elite Bangkok dan menggunakan kekuasaannya untuk berhadapan dengan kelompok masyarakat pedesaan. Akibatnya, proses politik di Thailand saat ini tak lebih dari persetujuan antara sekutu Thaksin dan kubu pemerintah yang didukung militer. Kedua, intervensi politik ke dalam dunia politik tidak hanya mengganggu pendalaman demokrasi di Thailand, tetapi juga semakin meningkatkan kekerasan yang berujung pada pelanggaran HAM dan pelemahan penegakan hukum, yang bisa dilihat dari kasus pembatasan berekspresi dan kekerasan di wilayah selatan Thailand.

Demokrasi memang adalah sesuatu yang baru bagi Thailand, baru berumur 30-an tahun sejak 1973, jika kita membandingkan dengan demokrasi Amerika yang sudah berumur 230-an tahun. Sehingga, belum fit antara sistem yang baru ini dengan

¹³⁹*Ibid*

¹⁴⁰*Ibid*

¹⁴¹*Ibid*

tradisi atau kultur politik, di mana kudeta militer adalah sesuatu yang telah berurat berakar, demikian pula masih kuatnya pengaruh monarki. Kesenjangan antara tradisi dan sistem demokrasi inilah yang menyebabkan demokrasi di Thailand tidak berfungsi dengan baik dan Thailand masih membutuhkan waktu untuk mengkonsolidasikan demokrasinya.

Kesimpulan mengenai situasi politik Thailand saat ini masih diragukan apakah demokrasi adalah sebuah rezim yang cocok untuk Thailand atau tidak. Meskipun militer dan pemerintah mengerahkan diri melalui gagasan kontribusi demokrasi konsolidasi untuk menghindari kekerasan lebih lanjut dan hilangnya nyawa, masih sulit untuk menjembatani kesenjangan antara pendukung Yingluck dan pemerintah Thailand. Negara bergerak menuju skenario terburuk dengan kasus kekerasan yang berkepanjangan, stabilitas keseluruhan sistem politik Thailand saat ini telah berada di tingkat rendah pasca kudeta. Perlu waktu dan kesabaran serta kerja sama antara pemerintah dan militer untuk dapat menciptakan resolusi politik dan demokrasi stabil pada saat ini yang diinginkan oleh rakyat Thailand.

4.4 PEMAKZULAN TERHADAP YINGLUCK SINAWATRA

Pemakzulan Yingluck Sinawathra merupakan Episode Akhir Keluarga Thaksin di Dunia Politik Thailand. Pemerintah junta militer Thailand melarang mantan perdana menteri Yingluck Shinawatra melakukan aktivitas politik selama 5 tahun. Larangan ini dikeluarkan setelah putusan bersalah dikeluarkan oleh parlemen Thailand, Jumat, 23 Januari 2015.¹⁴² Selain melarang aktif berpolitik, Yingluck juga akan menghadapi dakwaan atas penyalahgunaan dana skema subsidi beras bagi warga miskin Thailand. Sehingga kebijakan ini dianggap telah merugikan keuangan negara sebesar 10 miliar poundsterling, walaupun kebijakan tersebut populer di kalangan masyarakat desa. Selain hukuman larangan berpolitik, Adik bungsu mantan Perdana

¹⁴²VOA, 9 Januari 2015 *Yingluck Impeachment Trial Revisits Thailand's Political Divide*— Ron Corben, diakses dari <http://www.voanews.com/content/impeachment-trial-of-thailands-ex-pm-revisits-political-divide/2591689.html> (20 Januari 2015)

Menteri Thaksin Shinawatra ini juga diancam hukuman penjara 10 tahun jika terbukti bersalah nantinya. Mayoritas anggota parlemen, 198 orang melawan 18 orang, menyetujui pemakzulan Yingluck. Dengan putusan ini, Yingluck menjadi perdana menteri pertama dalam sejarah Thailand yang dimakzulkan dari jabatannya. Thaksin sendiri menjadi pelarian di luar negeri setelah dilengserkan dari kursi perdana menteri tahun 2006. Situasi dan kondisi dalam negeri Thailand, khususnya di Jalan-jalan di Ibukota Bangkok sepi saat putusan pemakzulan Yingluck berlangsung karena pendukung Yingluck tidak ada yang turun ke jalan dimana aparat keamanan bersiaga melakukan penjagaan di sekitar gedung parlemen. Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha menegaskan akan menangkap siapa saja yang melakukan aksi demo di jalan. Karena itu artinya melanggar undang-undang darurat militer yang diberlakukan setelah ia melakukan kudeta atas pemerintahan Yingluck.¹⁴³

Sementara itu, berkaitan dengan putusan hukuman terhadap dirinya tersebut, Yingluck Menentang Pemakzulan Dirinya itu yang semakin memperparah perpecahan negara. Dalam pembelaan kepada Majelis Legislatif Nasional yang dikuasai militer dalam dengar pendapat perdana tentang pemakzulan dirinya, Yingluck menjelaskan bahwa menjalankan pemerintahan dengan jujur dan mematuhi semua hukum yang berlaku selama masa pemerintahannya. Yingluck menolak tuduhan yang digulirkan oleh lembaga antikorupsi nasional tersebut dengan alasan bahwa kebijakan skema penjaminan beras bertujuan memperbaiki kehidupan para petani, mengurangi utang-utang mereka dan jatuhnya harga sehingga program "kontrak sosial" seperti itu bisa membantu 1,8 juta petani. Yingluck mengakhiri pembelaannya yang rinci dengan menekankan pentingnya para majelis untuk "berdiskusi dengan kebajikan, tanpa prasangka buruk maupun agenda politik tersembunyi".¹⁴⁴

¹⁴³*Yingluck Shinawatra impeachment verdict due in Thailand*– Kate Hodal 22 Januari 2015 diakses dari <http://www.theguardian.com/world/2015/jan/22/yingluck-shinawatra-impeachment-verdict-thailand> (25 Januari 2015)

¹⁴⁴BBC News Asia Yingluck Shinawatra: Ex-Thai PM rejects impeachment hearing allegations- 9 Januari 2015 diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-asia-30738604> (20 Januari 2015)

Pemakzulan itu sendiri hanya bisa dilakukan jika disetujui oleh 3/5 dari 250 orang majelis. Keputusan akhir diperkirakan akan diambil pada akhir Januari. Selain itu, jaksa juga sedang mempertimbangkan apakah Yingluck dapat dikenai tuntutan kriminal atas skema subsidi berasnya. Para analis memperkirakan bahwa pemakzulan adalah percobaan terakhir para pendukung kerajaan untuk menetralkan pengaruh keturunan Shinawatra yang partainya selalu menang di setiap pemilu sejak tahun 2001.¹⁴⁵ Jika diputuskan bersalah, pendukung Shinawatra yang tergabung dalam kelompok "kaus merah" diperkirakan akan melakukan protes setelah berbulan-bulan diam dalam peraturan darurat militer. Para pendukung menganggap bahwa proses peradilan dan tuntutan kriminal merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas untuk melumpuhkan pengaruh keluarga Shinawatra dan melemahkan dukungan pemilihnya yang mayoritas berasal dari kaum miskin di bagian utara Thailand. Menurut ahli politik Thailand, Thitinan Pongsudhirak proses pemakzulan Yingluck membuat junta militer dan pendukungnya dilema karena upaya menyingkirkan Yingluck dari lingkungan politik Thailand itu bisa membangkitkan konflik dalam negeri karena akan ada perlawanan dari pendukung proThaksin.

¹⁴⁵ *Ibid.*

BAB V. KESIMPULAN

Keputusan Mahkamah Konstitusi Thailand dalam membatalkan hasil pemilu tanggal 2 Februari 2014 menyebabkan gejolak politik yang besar dalam dinamika politik Thailand. Puncaknya ketika tanggal 7 Mei 2014, Mahkamah Konstitusi Thailand mencopot Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dari kursinya beserta 9 anggota kabinetnya yang lain. Beberapa alasan kuat yang dipakai oleh mahkamah konstitusi untuk menjatuhkan Yingluck Shinawatra dari kursi Perdana Menteri, diantaranya dengan kasus korupsi subsidi beras dan penyelewengan kekuasaan terhadap pemilihan sekretaris jenderal Dewan Keamanan Nasional. Keputusan MK tersebut justru menimbulkan gejolak politik baru di Thailand yang membuat kubu Partai Phue Thai yang mengusung Perdana Menteri Yingluck Shinawatra berkonflik dengan Partai Demokrat Thailand. Partai Demokrat Thailand tersebut mayoritas diisi oleh masyarakat kalangan borjuis dan menengah keatas.

Setelah dicopotnya Yingluck Shinawatra, kursi Perdana Menteri Thailand dilanjutkan oleh Niwatthamrong Boonsongphaisan. Namun Niwatthamrong Boonsongphaisan belum bisa menjalankan roda pemerintahan secara efektif, dan akhirnya pada Mei 2014 kembali dikudeta oleh pihak Militer. Kudeta ini juga mengangkat Panglima militer Thailand, Prayuth Chan-ocha sebagai Perdana Menteri sementara Thailand Prayuth Chan-ocha menerima penunjukan resmi dari kerajaan untuk menjalankan pemerintahan dalam upacara di ibukota Bangkok setelah mengambil alih kekuasaan dalam kudeta.

Rezim hasil kudeta itu menerapkan kontrol yang ketat terhadap aktivitas publik. Stasiun televisi dan radio misalnya, langsung diblokir dan hanya diperbolehkan menyiarkan musik tradisional. Militer memerintahkan media untuk tidak mewawancarai tokoh-tokoh publik seperti mantan pejabat pemerintahan, akademisi, hakim, atau anggota organisasi independen karena hal itu dianggap dapat menciptakan konflik atau kekacauan. Militer membekukan stasiun radio dan televisi karena dinilai menjadi akses strategis untuk menentang kudeta. Pihak Militer menilai jejaring sosial menjadi ancaman. Media sosial dinilai menjadi corong massa lainnya

untuk memprovokasi gerakan menentang kudeta. Rezim junta militer Thailand tidak hanya berhenti pada pemblokiran media, namun berlanjut sampai pembubaran parlemen dan akan membentuk sendiri badan legislatif. Langkah militer ini makin mendapatkan kecaman dari dunia internasional. Kudeta militer ini dinilai sebagai langkah melanggar hak asasi manusia yang mencederai demokrasi.

Meskipun militer dan pemerintah mengerahkan diri melalui gagasan kontribusi konsolidasi demokrasi untuk menghindari kekerasan lebih lanjut dan hilangnya nyawa, masih sulit untuk menjembatani kesenjangan antara pendukung Yingluck dan pemerintah Thailand. Negara bergerak menuju skenario terburuk dengan kasus kekerasan yang berkepanjangan, stabilitas keseluruhan sistem politik Thailand saat ini telah berada di tingkat rendah pasca kudeta. Masih perlu waktu dan kesabaran serta kerja sama antara pemerintah dan militer untuk dapat menciptakan resolusi konflik politik dan demokrasi yang stabil pada saat ini. Pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Sinawartha tidak berhasil mengatasi krisis karena elite-elite politik di Thailand belum memiliki kesamaan pandangan dalam membawa perubahan ke arah demokrasi Thailand. Mereka terpecah dan tidak sepakat tentang *rule of the game* yang seharusnya menjadi nilai sekaligus pegangan dalam demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharmini. 1989. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:PT. Bina Aksara.
- Diamond, Larry. 2006. *Electoral Systems and Democracy*. Baltimore, Maryland. The John Hopkins University.
- Fee Embre, John. 1969. *Loosely Structural Social Systems*. Michigan. Yale University.
- Habermas, Jurgen. 1975. *Legitimation Crisis*. NewYork. Beacon Press
- Hadi, Sutrisno. 1986. *Method Research Jilid 1*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Harding, Andrew. 2011. *The Constitutional System of Thailand: A Contextual Analysis*. Oxford. North America.
- Hawison, Kevin.2002. *Political Change In Thailand*. New York. Routledge.
- Huntington, Samuel P. 1995. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Grafiti.
- Ji Ungpakorn, Giles. 2007. *A Coup For The Rich: Thailand Political Crisis*. Bangkok. Workers Democracy Publishers.
- Ji Ungpakorn, Giles. 2009. Class Struggle Between the Coloured T-Shirts in Thailand. *Journal of Asia Pacific Studies Vol. 1, No. 1, 76-100*.
- Mas'oed, Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- McGregor Marshall, Andrew. 2014. *"A Kingdom In Crisis": Thailand Struggle For Democracy In The Twety First Century*.
- Nordlinger, Eric A. 1994. *Militer Dalam Politik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Surakhmad, Winarno. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Transisi.
- The Liang Gie. 1984. *Ilmu Politik: Suatu Pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan dan Metodologi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Jurnal dan Working Paper

Nugroho, Kris. "Konsolidasi Demokrasi", *Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik*. Volume 14, Nomor 2:25-34 Surabaya. Universitas Airlangga.

Rakson, Katsamaporn. "The influence of the military in Thai politics since the 1990s". Working Paper No.166. 2010. Deakin University. Australia.

Koran

Jawa Pos. Jum'at 9 Mei 2014. Nasib Yingluck Kian Terpuruk.

Jawa Pos. Sabtu, 22 Maret 2014. Pemilu Thailand Tidak Sah.

Kompas. Minggu, 16 Maret 2014. Krisis Thailand " Gelombang Demonstrasi Belum Juga Berakhir".

Koran Sindo. 03 April 2014. Konflik Politik Thailand - Mahkamah Konstitusi Anulir Pemilu. Diakses dari: <http://m.koran-sindo.com/node/376818> (15 April 2014)

Koran Sindo.Senin 31 Maret 2014. Thailand Gelar Pemilu Senat - Nasib Yingluck Ditentukan Hari Ini. Diakses dari: <http://koran-sindo.com/node/378816> (15 April 2014)

Internet

Abdul Manan. 2 Februari 2014.Fakta Soal Pemilihan Umum Thailand Hari Ini. Diakses dari: <http://www.tempo.co/read/news/2014/02/02/118550315/Fakta-Soal-Pemilihan-Umum-Thailand-Hari-Ini>. (7 Agustus 2014)

Adam Taylor dan Anup Kaphle.22 Mei 2014. Thailand's army just announced a coup. Here are 11 other Thai coups since 1932. Diakses dari: <http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/05/20/thailands-army-says-this-definitely-isnt-a-coup-heres-11-times-it-definitely-was/>. (2 Agustus 2015).

Ade Hapsari Lestarini. 29 Januari 2014.Thailand Kerahkan 10 ribu Polisi Amankan Pemilu. Diakses dari: <http://news.okezone.com/read/2014/01/29/411/933518/thailand-kerahkan-10-ribu-polisi-amankan-pemilu>. (5 Agustus 2015).

Ahmad Toriq. 3 Februari 2014. Pemilu di Thailand Diwarnai Unjuk Rasa. Diakses dari: <http://news.detik.com/read/2014/02/03/012449/2484978/1148/?nd772204topnews>. (7 Agustus 2014)

Alicia Sakina. 21 Maret 2014. MK Thailand Batalkan Pemilu Februari. Diakses dari: <http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/asean/14/03/21/n2sb43-mk-thailand-batalkan-pemilu-februari>. (10 Agustus 2014).

Aningtias Jatmika. 2 Februari 2014. Rusuh Pemilu Thailand, Wartawan Jadi Korban. Diakses dari: <http://www.tempo.co/read/news/2014/02/02/118550279/Rusuh-Pemilu-Thailand-Wartawan-Jadi-Korban?view=fullsite>. (7 Agustus 2014).

Anonim. 2 Desember 2013. Arrest warrant issued against Thai protest leader Suthep Thaugsuban. Diakses dari: <http://www.dw.de/arrest-warrant-issued-against-thai-protest-leader-suthep-thaugsuban/a-17267155>. (2 Agustus 2014).

Anonim. 9 Desember 2013. Thailand's prime minister dissolve Parliament, calls elections. Diakses dari: http://www.cleveland.com/world/index.ssf/2013/12/thailands_prime_minister_disso.html. (2 Agustus 2014).

Anonim. 8 Januari 2014. Thailand to deploy 15.000 police, troops for 'shutdown'. Diakses dari: <http://www.themalaysianinsider.com/world/article/thailand-to-deploy-15000-police-troops-for-shutdown>. (2 Agustus 2014).

Anonim. 15 Januari 2014. Attackers of Abhisit's house arrested. Diakses dari: <http://englishnews.thaipbs.or.th/attackers-abhisits-house-arrested>. (2 Agustus 2014).

Anuchit Nguyen and Supunnabul Suwannakij. 14 Januari 2014. Thai Protesters Extend Blockade After Rejecting Poll Talks. Diakses dari: <http://www.bloomberg.com/news/2014-01-13/thai-protesters-to-extend-blockade-after-rejecting-talks-on-poll.html>. (2 Agustus 2014).

Anusak Konglang. 28 Desember 2013. One dead as gunman opens fire at Thai protesters. Diakses dari: <http://www.thaivisa.com/forum/topic/692397-one-dead-as-gunman-opens-fire-at-thai-protesters/>. (2 Agustus 2014).

Antara news. Selasa, 10 Desember 2013. Raja Thailand setuju pemilu diselenggarakan 2 Februari. Diakses dari: <http://www.antaraneews.com/berita/408822/raja-thailand-setuju-pemilu-diselenggarakan-2-februari>. (5 Agustus 2014).

- Askan Krisna. 30 Januari 2014. Pemilu Thailand dalam sorotan. Diakses dari: <http://www.antaraneews.com/berita/416756/pemilu-thailand-dalam-sorotan>. (5 Agustus 2014).
- BBC. 3 July 2011. Thailand: Yingluck Shinawatra wins key election. Diakses dari: <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-14004755>. (2 Agustus 2014).
- BBC. 12 December 2013. Former Thai PM Abhisit Vejjajiva Charged With Murder. Diakses dari: <http://www.bbc.com/news/world-asia-25328880>. (2 Agustus 2014)
- BBC Indonesia. 26 Januari 2014. Pemimpin Oposisi Thailand Tewas Ditembak. Diakses dari: http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/01/140126_thailand_oposisi_tewas. (8 Agustus 2014)
- BBC. 2014. "Thailand Profile" diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-asia-15641745>. (2 Agustus 2014).
- BBC Indonesia. 2014. "Kudeta Militer di Thailand" diakses dari http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/05/140522_thailand_darurat pada tanggal 3 Agustus 2014.
- BBC Indonesia. 2014. "Yingluck Terancam Terjungkal di Pengadilan" diakses dari <http://www.dw.de/yingluck-terancam-terjungkal-di-pengadilan/a-17443840> pada tanggal 3 Agustus 2014
- BBC. 2014. "Thai PM Yingluck probed over 'Corrupt Rice Subsidy Scheme' diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-asia-25759007> pada tanggal 3 Agustus 2014
- BBC Indonesia. 2014. "Thailand Darurat Militer Pemilu" diakses dari http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/05/140520_thailand_darurat_militer_pemilu pada tanggal 3 Agustus 2014
- BBC News Asia Yingluck Shinawatra: Ex-Thai PM rejects impeachment hearing allegations- 9 Januari 2015 diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-asia-30738604> (20 Januari 2015)
- Bangkok Post. 2014. Former PM Yingluck Obeys Summons Reports to Junta General diakses dari <http://www.bangkokpost.com/news/politics/411386/former-pm-yingluck-obeys-summons-reports-to-junta-generals> pada tanggal 3 Agustus 2014

- DW.2014. Militer Thailand Ambil Alih Kekuasaan. Diakses dari <http://www.dw.de/militer-thailand-ambil-alih-kekuasaan/a-17653737> pada tanggal 3 Agustus 2014
- DW.2014. Pemilu Thailand ditunda Akibat Bentrok. Diakses dari <http://www.dw.de/pemilu-thailand-ditunda-akibat-bentrok/a-17637956> pada tanggal 3 Agustus 2014
- DW.2014. Militer Thailand Berlakukan Darurat Perang. Diakses dari <http://www.dw.de/militer-thailand-berlakukan-darurat-perang/a-17647315> pada tanggal 3 Agustus 2014
- DW. 2014. “Kerajaan Thailand Restui Kudeta Militer” diakses dari <http://www.dw.de/kerajaan-thailand-restui-kudeta-militer/a-17662739> pada tanggal 3 Agustus 2014
- DW. 2014. Militer Thailand Pertemukan Oposisi dengan Pemerintah diakses dari <http://www.dw.de/militer-thailand-pertemuan-oposisi-dan-pemerintah/a-17650266> pada tanggal 3 Agustus 2014
- DW.2014. “Kudeta Pengadilan Atas Yingluck” diakses dari <http://www.dw.de/kudeta-pengadilan-atas-yingluck/a-17617133> pada tanggal 3 Agustus 2014.
- Elin Yunita Kristanti. 25 November 2013. Dipicu RUU Amnesti, Bangkok Kembali Diguncang Demo. Diakses dari: <http://news.liputan6.com/read/755849/dipicu-ruu-amnesti-bangkok-kembali-diguncang-demo> (2 Agustus 2014)
- Heppy Ratna. 28 Januari 2014. Thailand Ajukan Surat penangkapan 16 Pemimpin Protes. Diakses dari: <http://www.antarane.ws.com/berita/416368/thailand-ajukan-surat-penangkapan-16-pemimpin-protos>. (6 Agustus 2014)
- International Rivers.2015. “Pak Mun Dam” diakses dari <http://www.internationalrivers.org/campaigns/pak-mun-dam-0>. (2 Agustus 2014).
- Iran Indonesian Radio.Sabtu 29 Maret 2014. Gejolak Politik dan Ancaman Disintegrasi di Thailand. Diakses dari: http://indonesian.ws.irib.ir/editorial/fokus/item/78557-Gejolak_Politik_dan_Ancaman_Disintegrasi__di_Thailand. (17 April 2014)

Kate Hodal. 22 Januari 2015 Yingluck Shinawatra impeachment verdict due in Thailand diakses dari <http://www.theguardian.com/world/2015/jan/22/yingluck-shinawatra-impeachment-verdict-thailand> (25 Januari 2015)

Lasthia Kertopati dan Santi Dewi. 2 Februari 2014. TPS Diblokir, Jutaan Warga Thailand TAK Dapat Ikut Pemilu. Diakses dari: <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/478096-tps-diblokir--jutaan-warga-thailand-tak-dapat-ikut-pemilu>. (7 Agustus 2014).

Lennox Samuels. 12 September 2013. Thailand Prime Minister Yingluck Shinawatra Dissolves Parliament, Calls for Elections. Diakses dari: <http://www.thedailybeast.com/articles/2013/12/09/thailand-prime-minister-yingluck-shinawatra-dissolves-parliament-calls-for-elections.html>. (2 Agustus 2014)

Lindsay Murdoch. 8 Desember 2013. Thailand's Mps Resign En Masse From Parliament. Diakses dari: <http://www.smh.com.au/world/thailands-mps-resign-en-masse-from-parliament-20131208-hv4uq.html>. (2 Agustus 2014).

MetroTV News.Com KONFLIK ANTARA KAOS MERAH, KUNING, PUTIH, DAN HITAM - 23 Mei 2014 Prita Daneswari di akses dari <http://internasional.metrotvnews.com/read/2014/05/23/245129/konflik-antara-kaos-merah-kuning-putih-dan-hitam> (2 Agustus 2014)

Natalia Santi. 26 November 2013. Bangkok Situasi Darurat, Dubes RI Imbau WNI Patuh. Diakses dari: <http://www.tempo.co/read/news/2013/11/26/118532452/Bangkok-Situasi-Darurat-Dubes-RI-Imbau-WNI-Patuh> (2 Agustus 2014)

Natalia Santi. 1 Februari 2014. Mantan PM Thailand Golput. Diakses dari: <http://www.tempo.co/read/news/2014/02/01/118550115/Mantan-PM-Thailand-Golput>. (7 Agustus 2014)

The Wall Street Journal. 21 Maret 2014. Mahkamah Thailand Batalkan Hasil Pemilu. Diakses dari: <http://indo.wsj.com/posts/2014/03/21/mahkamah-thailand-batalkan-hasil-pemilu/> (15 April 2014)

Sindonews.com. Kamis, 5 Juni 2014. Junta Militer Thailand Singkirkan Kroni-kroni Shinawatra. Diakses dari: <http://international.sindonews.com/read/870298/40/junta-militer-thailand-singkirkan-kroni-kroni-shinawatra> (18 Juni 2014)

Suara Pembaruan. Jumat, 21 Februari 2014. Yingluck Bantah Tuduhan Korupsi. Diakses dari: <http://www.suarapembaruan.com/home/yingluck-bantah-tuduhan-korupsi/49976> (15 April 2014)

Siar Batavia News. 11 Desember 2013. Raja Thailand Setuju Pemilu 2 Februari. Diakses dari: <http://siarbatavianews.com/news/view/1195/raja-thailand-setuju-pemilu-2-februari>. (5 Agustus 2014).

The New York Times. 2013. *Thomas Fuller "Protests Continue in Thailand After Election Is Set"*. Diakses dari: http://www.nytimes.com/2013/12/10/world/asia/thailand-protests.html?_r=0 (18 Mei 2014)

VOA, 9 Januari 2015 Yingluck Impeachment Trial Revisits Thailand's Political Divide – Ron Corben, diakses dari <http://www.voanews.com/content/impeachment-trial-of-thailands-ex-pm-revisits-political-divide/2591689.html> (20 Januari 2015)

VOA Indonesia. 9 Mei 2014. Ribuan Demonstran Anti-Pemerintah Turun ke Jalan Bangkok. Diakses dari: <http://www.voaindonesia.com/content/ribuan-demonstran-anti-pemerintah-turun-ke-jalan-bangkok/1911056.html> (10 Mei 2014)

Wassana Nanuan. 2014. Yingluck Goes Home For Barrack diakses dari <http://www.bangkokpost.com/news/politics/411741/yingluck-goes-home-from-barracks> pada tanggal 3 Agustus 2014

Wendy Zeldin. 12 Nov 2013. Thailand: Draft Amnesty Law Approved by House Likely to Be Turned Down by Senate. Diakses dari: http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_1205403753_text (2 Agustus 2014)

